

**EVALUASI PENENTUAN HARGA WAJAR
ATAS TRANSAKSI BUNGA PINJAMAN PT X
DARI PERUSAHAAN INDUK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

KHUSTANUL ARIF

NIM. 125030400111027



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2016**

MOTTO

“Jadilah yang terbaik selama engkau hidup”

“Hargailah dirimu sendiri” (GLL).

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Penentuan Harga Wajar atas Transaksi Bunga
Pinjaman PT X dari Perusahaan Induk

Disusun oleh : Khustanul Arif

NIM : 125030400111027

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 24 Juni 2016

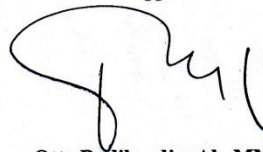
Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si
NIP. 195509021982022001

Anggota



Otto Budihardjo, Ak, MM

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Juni 2016

Jam : 10.30 WIB

Skripsi atas nama : Khustanul Arif

Judul : Evaluasi Penentuan Harga Wajar atas Transaksi
Bunga Pinjaman PT X dari Perusahaan Induk

Dan dinyatakan LULUS

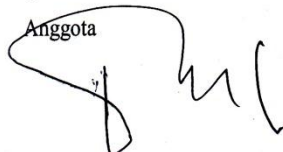
Majelis Penguji

Ketua



Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si
NIP. 195509021982022001

Anggota



Otto Budi Hardjo, Ak. MM

Anggota



Dr. Djamhur Hamid, M. Si
NIP. 194811101980101001

Anggota



Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA
NIK. 2013048811112001

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya, yang tersebut dibawah ini:

Nama : Khustanul Arif

NIM : 125030400111027

Judul Skripsi : Evaluasi Penentuan Harga Wajar Atas Transaksi Bunga Pinjaman
PT X Dari Perusahaan Induk.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam hasil karya skripsi saya, baik berupa naskah maupun gambar tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya skripsi yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis pada naskah disebutkan dalam sumber dan daftar pustaka.

Apabila ternyata terdapat unsur-unsur penjiplakan yang dapat dibuktikan di dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima pembatalan atas skripsi dan gelar akademik (S-1) yang telah diperoleh serta menjalani proses peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 25 Ayat 2 Pasal 70).

Malang, 3 Juni 2016
Yang Membuat Pernyataan,


Khustanul Arif
NIM. 125030400111027

RINGKASAN

Khustanul Arif, 2016, **Evaluasi Penentuan Harga Wajar Atas Transaksi Bunga Pinjaman PT X Dari Perusahaan Induk**, Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si, Otto Budihardjo, Ak, MM.

Penelitian ini dilakukan atas dasar upaya penggalian informasi penentuan harga wajar yang dilakukan oleh PT X atas transaksi bunga pinjaman dari perusahaan induk yang berada di Jepang. Penentuan harga wajar dilakukan karena transaksi kedua pihak lebih dari Rp10 Milyar dalam satu tahun sehingga setiap transaksi harus ditentukan kembali nilai wajarnya. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis bagaimana PT X menentukan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman yang diberikan perusahaan induk dan melakukan analisis apakah penentuan harga wajar yang dilakukan oleh PT X sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagai Undang-Undang *Transfer Pricing*.

Penelitian yang dilakukan berjenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari pihak staf perpajakan PT X melalui hasil wawancara dan dokumentasi tentang langkah langkah penentuan harga wajar transaksi bunga pinjaman dan dokumen *transfer pricing* PT X tahun 2012.

Hasil penelitian menunjukkan penentuan harga wajar yang dilakukan oleh PT X adalah melakukan analisis kesebandingan dengan mengambil data eksternal sebagai pembanding, memilih metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) sebagai metode penentuan harga transfer, menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menggunakan *rate* Bank Indonesia sebagai suku bunga pasar, serta melakukan dokumentasi atas setiap langkah penentuan harga wajar. Terdapat kesalahan penyebutan pokok utang dan suku bunga yang diberikan X *Corporation* sehingga jumlah pokok utang dan suku bunga yang disebutkan pada dokumen *transfer pricing* PT X jumlahnya berbeda dengan transaksi yang sebenarnya, namun pengujian atas suku bunga yang diberikan oleh X *Corporation* masih berada dibawah nilai terendah suku bunga dan langkah penentuan harga wajar yang dilakukan PT X sesuai dengan Undang-Undang *Transfer Pricing*.

Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyusunan dokumen *transfer pricing* PT X, staf perpajakan bisa melakukan koordinasi dengan bagian akuntansi PT X untuk mencegah adanya temuan apabila dilakukan pemeriksaan pada tahun berikutnya. Suku bunga yang diberikan X *Corporation* terlalu rendah namun tetap di anggap wajar jika dilihat dari pihak PT X, sebaliknya jika dilihat dari pihak X *Corporation* suku bunga tersebut dapat memberikan resiko dianggap tidak wajar apabila dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak di negara X *Corporation* karena suku bunga terlalu rendah sehingga sebaiknya X *Corporation* melakukan evaluasi.

Kata kunci: Penentuan harga wajar, bunga pinjaman, dokumen *transfer pricing*.

SUMMARY

Khustanul Arif, 2016, **Evaluation of Determination The Arm's Length Price For Loan Interest Transaction PT X from Parent Company**, Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si, Otto Budihardjo, Ak, MM.

This research was conducted on the basis of the effort of extracting information are determination the arm's length price made by PT X on loan interest transaction with the parent company located in Japan. The determinations were performed for both parties transactions of more than Rp 10 billion in one year so that each transaction must be redefined fair value. The purpose of this research to analyze how PT X determine The arm's length price of the transaction interest loan from parent company and analyzing whether determination the arm's length price made by PT X are in accordance with Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 about Penerapan Prinsip kewajaran dan Kelaziman Usaha as amended PER-32/PJ/2011 as transfer pricing regulation.

This research is descriptive research with qualitative approach, and the data used in this research are primary and secondary data obtained from the staff of taxation PT X through interviews and documentation of the steps determination the arm's length price for loan interest transaction and document transfer pricing PT X in 2012.

The results showed the determination of the arm's length price by PT X is the analysis of proportionality by taking external data as a comparison, choose the Comparable Uncontrolled Price (CUP) method as a method of transfer pricing, applying the arm's length principles by using the rate of Bank Indonesia as interest rates market, and conduct documentation of every step of determining the arm's length price. An error with the mention of the principal debt and interest rates given X Corporation so that the principal debt and interest rates mentioned in the document transfer pricing PT X amount different to the actual transaction, but testing on the interest rate provided by the X Corporation is below the lowest value of interest rate and a step of determine the arm's length price by PT X in accordance with the transfer pricing regulation.

To minimize the occurrence of errors preparation document transfer pricing PT X, taxation staff can coordinate with the accounting department PT X to prevent their findings where a survey conducted in the following year. Interest rates are given X Corporation too low but still is considered as arm's length price when viewed from the PT X, contrast when viewed from the X Corporation in interest rates could have a risk is considered not fair if the examination by the tax authorities in country X Corporation, as interest rates too low so we recommend X Corporation evaluates.

Keyword's: The arm's length price, loan interest, document transfer pricing.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Penentuan Harga Wajar Atas Transaksi Bunga Pinjaman PT X Dari Perusahaan Induk”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si., dan Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perpajakan.
4. Ibu Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Otto Budihardjo, Ak, MM, selaku anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bagian akuntansi dan staf perpajakan PT X yang telah membantu penyusunan skripsi ini dengan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.
7. Segenap keluarga dan orang tua tercinta, atas segala kasih sayang, motivasi dan dukungan, serta doa yang selalu diberikan kepada peneliti hingga saat ini.

8. Teman- teman yang selalu mendukung baik teman di Formasi, Aremafood, Dagri EM UB 2012, terima kasih atas dukunganya.
9. Teman-teman Program Studi Perpajakan angkatan 2012, atas dukungan, pengalaman, dan doa kepada peneliti.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, 3 Juni 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORSINILITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris	
1. Penelitian Terdahulu	11
2. Persamaan dan Perbedaan	12
B. Tinjauan Teoritis dan Konsep	
1. Penanaman Modal Asing	14
2. Hubungan Istimewa	16
3. Bunga Pinjaman	19
4. Acuan Suku Bunga.....	20
5. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda	24
6. <i>Transfer Pricing</i>	25
7. Penentuan harga wajar	27
8. Pemeriksaan <i>Transfer Pricing</i>	34
9. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Fokus Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Teknik pengumpulan data.....	40
F. Instrumen Penelitian	41

G. Keabsahan Data	42
H. Teknik Analisis Data	42

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	
1. Sejarah Pendirian PT X.....	45
2. Kegiatan Usaha dan Produk yang Dihasilkan PT X	46
3. Modal Saham PT X.....	47
4. Ringkasan Keuangan PT X.....	47
5. Struktur Organisasi PT X.....	48
6. Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan PT X	53
B. Penyajian Data	
1. Analisis Kesebandingan dan Menentukan Pembanding	55
2. Memilih Metode Penentuan Harga Transfer.....	69
3. Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha	70
4. Dokumentasi Langkah Penentuan Harga Wajar	72
C. Analisis Data	
1. Analisis Penentuan Harga Wajar	73
a. Analisis Kesebandingan dan Menentukan Pembanding	73
b. Memilih Metode Penentuan Harga Transfer	74
c. Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha	77
d. Dokumentasi Langkah Penentuan Harga Wajar	80
2. Analisis Kesesuaian dengan ketentuan perpajakan	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	13
4.1	Komposisi Kepemilikan Saham PT X	47
4.2	Gambaran Laporan Keuangan PT X	48
4.3	Aset yang dimiliki PT X.....	62
4.4	Karakteristik Perusahaan PT X	66
4.5	Transaksi PT X dengan Afiliasi	67
4.6	Tingkat Bunga 3 Bulan LIBOR	68
4.7	Bentuk Perjanjian Pinjaman PT X	68
4.8	Rentang Kuartil Kesebandingan Suku Bunga	71
4.9	Suku Bunga Bank Indonesia Setelah Diurutkan	78
4.10	Rincian Perbedaan Perhitungan	79
4.11	Kesesuaian dengan Undang-Undang <i>Transfer Pricing</i>	81

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.1	Data Neraca Perdagangan Indonesia	2
2.1	Kerangka Pemikiran Penelitian	36
4.1	Struktur Organisasi PT X	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pemberian Izin Riset
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
3. Bukti Transaksi Bunga Pinjaman PT X dengan X *Corporation*
4. Suku Bunga LIBOR tahun 2012
5. Nilai Kurs Bulan April tahun 2012
6. Daftar Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
7. Pedoman Wawancara
8. *Curriculum Vitae*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era modern ini perdagangan bukan hanya dilakukan di suatu wilayah, kini sudah mulai dilakukan antar daerah bahkan antar negara. Penyebab perdagangan tersebut karena tingkat kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan sumber daya alam serta sumber daya yang lain tidak mencukupi, sehingga membuat pemenuhan kebutuhan tersebut dicari dari daerah lain maupun negara lain atau yang disebut dengan impor. Menurut Amir (2004:139), impor merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baku berupa barang maupun jasa yang didapat dari negara lain karena kebutuhan tersebut tidak bisa didapatkan di negara sendiri.

Indonesia sebagai negara yang besar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi masih membutuhkan berbagai macam kebutuhan yang tidak bisa didapatkan di Negara Indonesia sendiri, seperti mesin pengolah dan juga tenaga ahli untuk mengolah bahan menjadi barang yang dibutuhkan. Indonesia bukan hanya melakukan pemenuhan mesin pengolah dan tenaga ahli dari luar negeri, kegiatan impor barang juga dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan, mulai dari kebutuhan untuk konsumsi maupun bahan baku pendukung yang digunakan untuk kebutuhan produksi bagi perusahaan yang berada di Indonesia. Perkembangan impor Indonesia setiap tahun selalu meningkat terlihat mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2013 jumlahnya tidak pernah menurun (kompasiana.com: 2013).



Gambar 1.1 Data Neraca Perdagangan Indonesia

Sumber: Kompasiana.com

Terlihat dari Gambar 1.1 angka impor terjadi peningkatan sekitar 50 milyar rupiah per tahun sejak tahun 2009 hingga tahun 2013. Akibat dari perkembangan impor di setiap tahun yang selalu tinggi membuat negara harus melakukan kerjasama dengan negara lain. Pemerintah Negara Republik Indonesia mengambil langkah dengan ikut bergabung dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) guna menghadapi permasalahan ekonomi global yang telah terjadi. Bergabungnya Indonesia dengan negara-negara di Asia dalam keterbukaan sistem perekonomian, membuat Penanaman Modal Asing (PMA) sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan juga meningkatkan lapangan pekerjaan (mea.co.id: 2015).

Jenis usaha bidang manufaktur banyak diminati oleh negara asing untuk penanaman modal asing di Indonesia. Tingginya pangsa pasar di Indonesia karena terkait jumlah penduduk yang besar, jumlah tenaga kerja yang tersedia, serta ketersediaan bahan baku utama merupakan nilai tambah bagi investasi asing yang masuk. Menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2012, total nilai investasi asing naik 61,4% dari US\$1,1 miliar pada 2011 menjadi US\$1,7

miliar dan yang menjadi kontributor ketiga terbesar penanaman modal asing adalah di bidang manufaktur (Kemenperin.go.id: 2012).

Hubungan antara perusahaan induk yang berada di luar negeri dengan anak perusahaan yang berada di Indonesia bukan hanya sebatas pemberi modal saja, namun juga berbentuk pengawasan manajemen atau pemberian sebuah pinjaman. Pinjaman tersebut tidak selalu berbentuk uang, namun dapat berbentuk sebuah bahan pendukung produksi maupun jasa tenaga ahli yang tidak bisa ditemukan di negara anak perusahaan, dan dari pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan tentu terdapat beban bunga yang akan dibayar kepada perusahaan induk. Bank Indonesia (BI) tengah mengkaji pengajuan pinjaman luar negeri untuk memperbaiki komposisi likuiditas dan juga memantau pertumbuhan jumlah pinjaman luar negeri setiap tahun (Finansial.bisnis.com: 2015).

Anak perusahaan bisa mendapatkan dana pinjaman dari perusahaan induk yang berada di luar negeri melalui beberapa cara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa terdapat dua cara untuk memperoleh dana dari luar negeri yang pertama yaitu melalui perjanjian pinjam-meminjam (*loan agreement*), jika pemodal luar negeri memberikan dana dengan cara memberikan pinjaman kepada anak perusahaan, maka anak perusahaan akan memiliki utang luar negeri dan menjadi debitur utang luar negeri. Pembagian keuntungan (*profit sharing*) dapat disepakati oleh para pihak yang melakukan pinjam-meminjam dan dituangkan dalam sebuah perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam-meminjam yang mengikat sebagai undang-undang bagi kedua pihak yang melakukan transaksi. Cara yang kedua yaitu dana

pinjaman yang diberikan dari perusahaan induk kepada anak perusahaan diberikan dengan cara penanaman modal asing ke dalam badan hukum Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA).

Semakin banyak Penanaman Modal Asing (PMA) maka semakin banyak pula transaksi antar negara. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 yang kemudian disebut sebagai ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing* disebutkan bahwa nilai transaksi yang sebenarnya ditentukan berdasarkan proses tawar-menawar dan negosiasi antara masing-masing pihak untuk mencapai keuntungan maksimal, sehingga harga yang terjadi adalah harga pasar karena transaksi dapat menjadi tidak wajar apabila diantara pihak terdapat hubungan istimewa.

Hubungan istimewa dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai undang-undang pajak penghasilan disebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ingin memastikan agar setiap transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak terhitung wajar, maka setiap transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa akan ditentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya dari penghasilan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak

lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Pihak yang memiliki hubungan istimewa harus menerapkan prinsip *Arm's Length Principle* (ALP) atau yang disebut prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk menghilangkan praktik penentuan harga dengan tujuan perpajakan atau yang disebut *transfer pricing*. *Transfer pricing* sangat relevan dengan ekonomi bisnis dan tujuan perpajakan (Darussalam 2007:163), karena *Transfer pricing* dapat diterapkan pada setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu :

1. Suatu organisasi dengan organisasi yang lain;
2. Kantor pusat dengan kantor cabangnya (Bentuk Usaha Tetap);
3. Kantor cabang dengan kantor cabang lain yang memiliki dewan komisaris sama atau masih dalam satu perusahaan yang sama.

Pengawasan yang dilakukan DJP kepada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk memastikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ialah mewajibkan PMA menyerahkan dokumen *transfer pricing* apabila terdapat transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa wajib pajak harus melakukan pembukuan, salah satunya melakukan dokumentasi atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dokumen *transfer pricing* adalah sekumpulan catatan yang berisi penjelasan mengenai penentuan nilai atau harga transfer yang digunakan pada

setiap transaksi yang dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa, penentuan nilai harga transfer wajar harus menggunakan formula atau metode penetapan harga transfer yang sudah ditentukan dan berlaku secara internasional.

Berdasarkan peraturan perpajakan tentang *Transfer Pricing* ada 5 (lima) metode penetapan harga transfer yang dapat diterapkan oleh wajib pajak dan yang berlaku secara internasional, yaitu:

- a. Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*);
- b. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*);
- c. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method/CPM*);
- d. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*);
- e. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*).

Kelima metode penetapan harga transfer tersebut harus diterapkan secara hierarkis dimulai dari metode CUP, apabila metode CUP tidak dapat diterapkan atau dirasa kurang tepat untuk diterapkan pada sebuah transaksi karena data pembanding dari pihak independen tidak ditemukan, maka penerapan perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode RPM atau CPM. Setelah dilakukan pemilihan dan penerapan metode RPM atau CPM juga masih kurang tepat karena struktur kelengkapan data atau kompleksitas sebuah transaksi, maka penentuan harga transfer bisa dilakukan dengan menggunakan metode TNMM atau PSM. Seluruh perhitungan dan langkah-langkah dalam menentukan harga transfer harus didokumentasikan secara tertulis dan menjadi bagian penting dari dokumen *transfer pricing*.

PT X merupakan anak perusahaan dari sebuah perusahaan yang berasal dari Jepang bergerak dibidang manufaktur yang memproduksi aksesoris otomotif, dalam menjalankan kegiatan usahanya pada tahun 2012 PT X melakukan transaksi utang kepada perusahaan induk berupa modal kerja yang digunakan untuk membeli mesin pengolah dan jasa tenaga ahli sebagai kebutuhan proses produksi dalam sebuah perjanjian antara kedua pihak (*loan agreement*). Utang yang diberikan perusahaan induk tersebut memiliki beban bunga pinjaman yang harus dibayar oleh PT X dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati.

Tahun 2012 transaksi yang dilakukan oleh PT X dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa lebih dari Rp10 Milyar, sehingga PT X melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menyerahkan dokumen *transfer pricing* kepada DJP sebagai laporan transaksi harga wajar yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dokumen *transfer pricing* yang diserahkan PT X kepada DJP juga berisi penentuan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman yang dibayarkan kepada perusahaan induk. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan evaluasi penentuan harga wajar atas beberapa transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa dan terindikasi *transfer pricing* namun peneliti belum menemukan penelitian tentang penentuan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“EVALUASI PENENTUAN HARGA WAJAR ATAS TRANSAKSI BUNGA PINJAMAN PT X DARI PERUSAHAAN INDUK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana PT X menentukan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman yang dilakukan dengan perusahaan induk?
2. Bagaimana kesesuaian penentuan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman yang digunakan oleh PT X dengan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing*?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara PT X menentukan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman yang dilakukan dengan perusahaan induk.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penentuan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman yang digunakan oleh PT X dengan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing*.

D. Kontribusi Penelitian

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kontribusi, yaitu:

1. Bidang Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti selanjutnya yang mengambil kajian yang sama serta sebagai bahan penelitian khususnya mengenai penentuan harga wajar terhadap transaksi bunga pinjaman pada perusahaan induk.

2. Bidang Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada wajib pajak dalam mengambil keputusan terkait penentuan harga wajar pada transaksi bunga pinjaman dari perusahaan induk pada tahun berikutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang pemadatan isi dari masing-masing bab yang ditulis dalam skripsi ini. Perincian sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan empiris dan tinjauan teoritis. Tinjauan empiris berisi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *transfer pricing*, dan persamaan serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Tinjauan teoritis berisi tentang penanaman modal asing, hubungan istimewa, bunga pinjaman, acuan suku bunga, perjanjian penghindaran pajak berganda, *transfer pricing*, penentuan harga wajar, pemeriksaan *transfer pricing*, dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum, penyajian data dan analisis data. Gambaran umum berisi sejarah pendirian PT X, kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan PT X, modal saham PT X, ringkasan keuangan PT X, struktur organisasi PT X, pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan PT X. Penyajian data berisi analisis kesebandingan dan mencari pembanding, memilih metode penentuan harga transfer, menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Analisis data berisi analisis penentuan harga wajar dan analisis kesesuaian dengan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi saran dan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai tinjauan empiris dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan pencarian tentang penelitian yang berhubungan dengan *Transfer Pricing* di kalangan akademis, dan mencari persamaan serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan.

1. Penelitian terdahulu

Penelitian ini membahas “EVALUASI PENENTUAN HARGA WAJAR ATAS TRANSAKSI BUNGA PINJAMAN PT X DARI PERUSAHAAN INDUK”, berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian ini:

- a) Karya ilmiah yang dilakukan oleh Medianti Jipi Saraswati tahun 2014 yang berjudul, “Evaluasi Kewajaran Harga dan Kesesuaian Metode *Transfer Pricing* dengan Perdirjen Pajak Per-32/PJ/2011 (Studi di PT Martex Indonesia)”, dalam isinya PT Mertex salah satu perusahaan dari penanaman modal asing yang bergerak di bidang produksi pakaian dan tekstil yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto. PT Mertex mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di Jepang yaitu Shikibo CO. Ltd. dan Nomura Trading. Peneliti menganggap tepat pemilihan metode *Transactional Net Margin Method* (TNMM) atas transaksi penjualan

PT Mertex dengan alasan terlalu kompleksnya transaksi penjualan atas barang yang sama kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, serta pihak independen memiliki karakteristik dan struktur biaya yang berbeda.

- b) Karya ilmiah yang dilakukan oleh Clarissa G.S. tahun 2012 yang berjudul, “Analisis Praktik *Transfer Pricing* atas Produk Digital pada PT KLM”, adapun hasilnya dalam penentuan harga wajar PT KLM pada dokumen *transfer pricing* menggunakan metode *Comparable Uncontrolled Price method* (CUP) dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode. PT KLM tidak hanya menyerahkan dokumen *transfer pricing*, namun juga menggunakan *Advance Pricing Agreement* (APA), prosedur ini memperbolehkan wajib pajak membuat kesepakatan dengan otoritas pajak tentang aplikasi salah satu metode *transfer pricing*, dengan demikian wajib pajak terikat untuk memakai metode tersebut dan administrasi pajak tetap menguji kesepakatan tersebut.

2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan, dapat ditemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Secara ringkas Tabel 2.1 berikut akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan:

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Aspek	Penelitian 1	Penelitian 2
Nama Peneliti, Tahun	Medianti Jipi Saraswati, 2014	Clarissa G.S., 2012
Judul Penelitian	Evaluasi Kewajaran Harga dan Kesesuaian Metode <i>Transfer Pricing</i> dengan Perdirjen Pajak Per-32/PJ/2011(Studi di PT Martex Indonesia)	Analisis Praktik <i>Transfer Pricing</i> atas Produk Digital pada PT KLM
Jenis Penelitian	Deskriptif pendekatan kualitatif	Deskriptif pendekatan kualitatif
Hasil Penelitian	Pemilihan metode <i>Transactional Net Margin Method</i> (TNMM) atas transaksi penjualan PT Mertex dengan alasan terlalu kompleksnya transaksi penjualan.	Penentuan harga wajar PT KLM dalam dokumen <i>transfer pricing</i> menggunakan metode <i>Comparable Uncontrolled Price method</i> (CUP) dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode, namun PT KLM tetap menggunakan <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA).
Persamaan dengan Penelitian ini	Penelitian 1 juga melakukan evaluasi terhadap penentuan harga wajar suatu transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.	Penelitian 2 juga melakukan pengujian harga wajar yang berfokus pada satu transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa yaitu nilai wajar atas transaksi royalti dan

		menggunakan metode yang sama dengan penelitian ini.
Perbedaan dengan Penelitian ini	Penentuan harga wajar yang dilakukan pada penelitian 1 menggunakan metode TNMM, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan metode CUP.	Pada penelitian 2 penentuan harga wajar atas transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa bukan hanya menyerahkan dokumen <i>transfer pricing</i> , tapi juga membutuhkan dokumen pendukung apabila memang diperlukan seperti <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> .

Sumber: Diolah Peneliti, 2016

B. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Penanaman Modal Asing

Menurut Panjaitan (2003:28), penanaman modal asing adalah suatu kegiatan penanaman modal yang di dalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*), unsur asing tersebut ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan sebagainya. Sedangkan menurut *Organization of Economic Cooperation* (Sianipar, 2008:41), penanaman modal asing secara langsung merupakan suatu bentuk penanaman modal asing dimana penanam modal diberikan keleluasaan penguasaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, sedangkan di Indonesia penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa penanaman modal asing berarti kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

dilakukan oleh penanam modal asing, baik dengan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki beberapa jenis, menurut Sihombing (2008:160), jenis-jenis penanaman modal dibedakan yaitu:

- a. Penanaman modal langsung (*Direct Investment*), yakni investasi yang dilaksanakan dengan kepemilikan proyek yang tampak wujudnya.
- b. Penanaman modal tidak langsung (*Indirect Investment*), yakni penanaman modal yang dilakukan dengan membeli surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perseroan ataupun yang diterbitkan oleh pemerintah.

Penanaman Modal Asing atau sering disebut dengan perusahaan multinasional memiliki sisi kelebihan bagi sebuah negara diantaranya membuka lapangan kerja baru, fungsi dari penanaman modal asing menurut John W. Head (Sutrisno, 2012:86) mempunyai 7 fungsi yaitu:

- 1) Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka;
- 2) Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru;
- 3) Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendapatkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya;

- 4) Menghasilkan pengalihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;
- 5) Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;
- 6) Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan rumah;
- 7) Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya dari semula.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak luar negeri dengan diberikan keleluasaan penguasaan dan penyelenggaraan pimpinan. Penanaman modal asing sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat negara tersebut, baik melalui penanaman modal asing secara langsung maupun secara tidak langsung.

2. Hubungan Istimewa

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.53/1995 tentang Pengertian Hubungan Istimewa, disebutkan bahwa hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan pihak yang menerima penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh salah satu dari faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Kepemilikan atau Penyertaan

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan berupa penyertaan modal kepada sebuah badan usaha atau perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, baik secara langsung atau tidak langsung.

Contoh penyertaan secara langsung:

PT A memiliki 50% (lima puluh persen) saham PT B, Kepemilikan saham PT B oleh PT A tersebut merupakan penyertaan modal secara langsung sebesar lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus), dalam hal ini dianggap ada hubungan istimewa antara PT A dan PT B.

Contoh penyertaan secara tidak langsung:

Jika PT B memiliki 50% (lima puluh persen) saham PT C maka PT A sebagai pemegang saham PT B, secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal tersebut, antara PT A, PT B, dan PT C terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan modal seperti tersebut juga dapat terjadi antara orang pribadi dan badan.

b. Faktor Penguasaan Manajemen atau Penggunaan Teknologi

Hubungan istimewa antara pengusaha dapat juga terjadi karena adanya penguasaan melalui manajemen ataupun penggunaan teknologi, meskipun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa ada apabila satu atau lebih perusahaan berada dibawah penguasaan yang sama,

demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan pengusaha yang sama tersebut.

Contoh penguasaan melalui manajemen:

Tuan A, Direktur utama di perusahaan B, juga menjabat sebagai Direktur utama di perusahaan C. Terdapat hubungan istimewa antara perusahaan B dan C, karena adanya penguasaan melalui manajemen oleh tuan A terhadap perusahaan B dan C.

Contoh penguasaan melalui penggunaan teknologi:

Perusahaan X yang memproduksi minuman menggunakan formula yang diciptakan oleh perusahaan Y. Dalam hal ini ada penguasaan melalui penggunaan teknologi oleh perusahaan Y terhadap perusahaan X, sehingga terjadi hubungan istimewa antara perusahaan X dan perusahaan Y.

c. Faktor Hubungan Keluarga Sedarah atau Semenda

Hubungan keluarga sedarah atau semenda ini dapat menimbulkan hubungan istimewa diantara orang pribadi. Hubungan keluarga sedarah yang menimbulkan hubungan istimewa adalah hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yaitu hubungan antara seseorang dengan ayahnya, atau dengan ibunya, atau dengan anaknya, dan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan kakaknya, atau dengan adiknya. Hubungan keluarga semenda yang dapat menimbulkan hubungan istimewa adalah hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan mertuanya, atau dengan anak

tirinya, dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan iparnya. Apabila antara suami istri terdapat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka antara suami istri tersebut terdapat hubungan istimewa.

Kesimpulanya, hubungan istimewa dapat mempengaruhi harga karena terdapat kemungkinan harga ditekan lebih rendah atau lebih tinggi dari harga pasar. Dalam hal demikian maka yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga pasar yang wajar yang berlaku di pasar bebas.

3. Bunga Pinjaman

Loan interest atau dalam bahasa Indonesia bunga pinjaman menurut Miller, RL dan Vanhooose (Puspoprano, 2004:39), merupakan imbalan jasa atas pinjaman uang, imbalan jasa ini adalah suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila di investasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut “pokok utang” (*principal*), persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut “suku bunga”.

Sedangkan menurut Herman (2003:24), suku bunga adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu atau harga dari penggunaan uang yang dipergunakan pada saat ini dan akan dikembalikan pada saat mendatang. Pinjaman dapat berupa kredit modal kerja (*working capital loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usahanya atau perputaran modal misalnya pemberian barang dagangan dan lainnya. Pinjaman juga bisa berupa kredit investasi (*investment loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk

membiayai pembelian aktiva tetap (misalnya tanah, bangunan, mesin, kendaraan) untuk produksi barang dan jasa utama yang diperlukan guna relokasi, ekspansi, modernisasi usaha maupun pendirian usaha baru, atau juga bisa berupa kredit konsumsi (*consumer loan*), yaitu kredit yang diberikan bank untuk membiayai pembelian barang yang tujuannya tidak untuk usaha tetapi untuk pemakaian pribadi.

Dapat disimpulkan bahwa bunga pinjaman merupakan imbalan atas pinjaman yang diberikan kepada pemberi pinjaman dari manfaat uang apabila di investasikan. Bunga pinjaman dapat berasal dari pinjaman atas modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak peminjam dan pemberi pinjaman.

4. Acuan Suku Bunga

Menurut Laksmono (2001:130), nilai suku bunga domestik di Indonesia sangat terkait dengan tingkat suku bunga internasional, keterkaitan ini disebabkan oleh akses pasar keuangan domestik terhadap pasar keuangan internasional serta kebijakan nilai tukar mata uang yang kurang fleksibel. Suku bunga saat ini memiliki banyak acuan, namun penggunaan acuan suku bunga tetap pada perjanjian yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan transaksi pinjam-meminjam, berikut beberapa acuan suku bunga:

a. Suku Bunga Bank Indonesia

Menurut Siamat (2005:139) suku bunga Bank Indonesia adalah suku bunga dengan tempo satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia

secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (*stance*) kebijakan moneter.

Sedangkan menurut Bank Indonesia dalam *Inflation Targeting Framework*, *BI Rate* merupakan suku bunga acuan Bank Indonesia dan merupakan sinyal (*stance*) dari kebijakan moneter Bank Indonesia. “*BI Rate* adalah suku bunga instrumen sinyaling Bank Indonesia yang ditetapkan pada RDG (Rapat Dewan Gubernur) triwulanan untuk berlaku selama triwulan berjalan (satu triwulan), kecuali ditetapkan berbeda oleh RDG bulanan dalam triwulan yang sama”.

Dari pengertian tersebut terlihat jelas bahwa *BI Rate* berfungsi sebagai sinyal dari kebijakan moneter Bank Indonesia, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa respon kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan, atau tidak berubahnya *BI Rate* tersebut.

b. JIBOR

Menurut situs Bank Indonesia JIBOR kependekan dari *Jakarta Interbank Offered Rate* adalah suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi pasar uang antarbank atau PUAB di Indonesia. Suku bunga indikasi penawaran adalah suku bunga pada transaksi *unsecured loan* antar bank, yang mencerminkan suku bunga pinjaman yang ditawarkan suatu bank kepada bank lain sekaligus dan suku bunga pinjaman yang bersedia diterima suatu bank dari bank lain (www.bi.go.id: 2016).

JIBOR terdiri atas dua mata uang yakni rupiah (IDR) dan dolar AS (USD), masing-masing terdiri dari 6 tempo yakni 1 hari, 1 minggu, 1 bulan,

3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. JIBOR diharapkan dapat menjadi suku bunga acuan yang kredibel dan digunakan pada banyak transaksi keuangan di Indonesia, sehingga mendorong pendalaman pasar keuangan domestik karena akan:

- 1) Mendorong pengembangan PUAB terutama untuk transaksi dengan tenor diatas 1 bulan yang saat ini transaksinya sangat kecil dan tidak memiliki *benchmark* suku bunga,
- 2) Mendorong pelaku pasar untuk menciptakan instrumen pasar uang lain yang berbasis suku bunga,
- 3) Menciptakan patokan suku bunga bagi transaksi derivatif (transaksi yang didasari pada suatu perjanjian) dan transaksi yang berbasis *floating rate* (bunga mengambang),
- 4) Membantu bank dalam menentukan suku bunga pinjaman dan deposito bagi nasabah prima,
- 5) Membantu pembentukan benchmark untuk pasar obligasi .

c. LIBOR

Menurut Scanella (2013: 65) LIBOR atau *London interbank offered rate* adalah kurs referensi harian dari suku bunga yang ditawarkan dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan oleh suatu bank kepada bank lainnya dipasar uang London (atau pasar uang antar bank). Suku bunga rata-rata LIBOR dihitung dari biaya meminjam (*cost of funds*) dana jangka pendek tanpa agunan (*unsecured*) yang harus dibayar bank anggota asosiasi perbankan Inggris untuk memperoleh dana jangka pendek dari bank lain,

setiap hari bank terpilih menyerahkan laporan perkiraan *cost of funds*. LIBOR memiliki anggota sekitar 16 bank raksasa, seperti Norinchukin (Jepang), West LB (Jerman), UBS (Swiss), RBS (Inggris), RBC (Kanada), Rabobank (Belanda), JP Morgan (AS), HBOS (Inggris), HSBC (Inggris), Lloyds (Inggris), Deutsche Bank (Jerman), Credit Suisse (Swiss), Citibank (AS), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) dari Jepang, Bank of America, dan Barclays (Inggris). Setiap hari akan diumumkan angka LIBOR untuk 15 jenis pinjaman yang dibedakan menurut jangka waktu pengembalian (tenor)—jatuh tempo tersebut berkisar antara 1, 2, atau 3 minggu sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 bulan.—dan meliputi 10 jenis mata uang, termasuk Dollar AS, Euro, Poundsterling, dan Franc Swiss.

d. SIBOR

Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR) adalah suku bunga rata-rata yang ditawarkan untuk transaksi pinjam-meminjam antar bank di negara Singapura atau tingkat suku bunga rata-rata internasional perbankan Singapura. Suku bunga dari bank Singapura ini dapat mempengaruhi nilai atau pergerakan indeks di bursa saham yang dinyatakan dalam satuan persen, sehingga keberadaan dari SIBOR ini akan berpengaruh terhadap nilai investasi dalam negeri atau domestik di Indonesia (investopedia.com: 2016).

Umumnya suku bunga memiliki berbagai macam acuan seperti yang disebutkan di atas, namun penerapan yang dilakukan tetap mengacu pada persetujuan antara kedua pihak yang melakukan transaksi pinjam-meminjam.

5. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Menurut Adriani (Waluyo, 2013:2), hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam UU Nasional mengenai pemajakan terhadap orang-orang luar negeri, peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda dan traktat-traktat.

Penentuan aspek perpajakan tersebut dilakukan berdasarkan klausul-klausul yang terdapat dalam *tax treaty* yang bersangkutan sesuai jenis transaksi yang sedang dihadapi. Payung hukum persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B ini adalah Pasal 32A undang-undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan pasal ini Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh 26) atas transaksi bunga pinjaman sesuai dengan P3B yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dengan pihak pemungut pajak Negara Jepang adalah sebesar 10% dari besarnya bunga pinjaman.

Penjelasan Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dilakukannya perundingan dengan negara lain untuk membuat perjanjian perpajakan ini memiliki dua tujuan utama yaitu pertama menghindari pengenaan pajak berganda (*avoidance of double taxation*) dan yang kedua adalah mencegah pengelakan pajak (*prevention of fiscal evasion*). Penjelasan Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan juga ditegaskan bahwa perjanjian perpajakan yang dilakukan pemerintah ini adalah dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain. Suatu perjanjian perpajakan atau tax treaty bertujuan pula untuk mendorong arus modal, teknologi, dan keahlian ke suatu negara. P3B juga akan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, memperlancar transaksi ekonomi antar negara dan meningkatkan kerjasama antar negara.

6. *Transfer Pricing*

Beberapa tokoh mengartikan *transfer pricing*, baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Berikut menurut beberapa tokoh pengertian *transfer pricing* (Suandy, 2003:71):

a. Dr. Gunadi M.Sc., Ak

Harga transfer adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

b. Charles T. Horngren dan Gary L.Sundem

Transfer pricing adalah jumlah yang dibebankan oleh satu segmen dari suatu organisasi untuk produk yang memasok ke segmen lain dari suatu

organisasi yang sama di perusahaan multinasional. Harga transfer digunakan untuk meminimalkan pajak penghasilan di seluruh dunia dan bea masuk.

c. Sophar Lumbantoruan

Harga transfer adalah penentuan harga balas jasa suatu transaksi antar unit dalam suatu perusahaan atau antar unit dalam suatu perusahaan atau antar perusahaan dalam suatu grup.

d. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Harga transfer adalah suatu perbuatan pemberian harga faktur (*invoice*) pada barang-barang (juga jasa) yang diserahkan antar bagian/cabang suatu perusahaan multinasional.

Dapat disimpulkan bahwa *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*Multi-National Enterprise*). Tujuan *transfer pricing* ialah untuk menentukan jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah.

Menghilangkan *transfer pricing* bukan urusan yang mudah, ketiadaan akses publik ke dalam detil rincian transaksi perusahaan menyebabkan perusahaan leluasa memodifikasi laporan keuangan, bahkan perusahaan terbuka (Tbk) juga bisa melakukan *transfer pricing*. Penentuan *transfer pricing* tidak hanya dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, Undang-Undang *Transfer Pricing* menyatakan bahwa penentuan harga transaksi wajar (*Arm's Length Price*) bisa melalui metode perbandingan harga antara pihak non istimewa,

resale price dan metode lainnya. Syarat utama analisis ini adalah ketersediaan data pembandingan eksternal maupun internal.

7. Penentuan Harga Wajar

a. Nilai wajar

Fair value atau yang disebut nilai wajar adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu objek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan, sehingga *fair value* bukanlah nilai yang akan diterima atau dibayarkan entitas dalam suatu transaksi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan (Suwardjono, 2008:475). Nilai wajar adalah nilai yang wajar mencerminkan kualitas kredit suatu instrumen.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 68 tahun 2013 tentang Pengukuran Nilai Wajar menyebutkan bahwa definisi nilai wajar (*fair value*) ialah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar adalah pengukuran berbasis pasar, bukan pengukuran berbasis entitas. Pengukuran nilai wajar digunakan untuk mengukur aset atau liabilitas tertentu yang berdiri sendiri maupun berkelompok.

Undang-Undang *Transfer Pricing* memberikan pengertian tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle /ALP*) sebagai prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi transaksi yang

dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak independen yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak independen yang menjadi pembanding. Transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa secara keseluruhan yang tidak melampaui Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) tidak diwajibkan memenuhi kewajiban melakukan langkah-langkah tersebut.

Analisis kesebandingan yang merupakan analisis yang dilakukan oleh wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.

Penerapan ALP hanya dilakukan terhadap transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*). Dengan kata lain, apabila transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, ALP tidak perlu dilakukan sebagaimana transaksi independen. Wajib pajak yang melakukan transaksi-transaksi di atas dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib untuk menerapkan prinsip kewajaran

dan kelaziman usaha dengan melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding, menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat, dan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, serta mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Langkah-langkah Penentuan Harga Wajar

Berdasarkan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing*, langkah-langkah dalam menentukan harga wajar adalah melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding, menentukan metode penentuan harga transfer, menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan melakukan dokumentasi setiap langkah dalam penentuan harga wajar. Lebih jelasnya akan di bahas sebagai berikut:

1) Melakukan Analisis Kesebandingan dan Menentukan Pembanding

Analisis Kesebandingan bisa dilakukan apabila tersedia data pembanding internal dan data pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka wajib pajak wajib menggunakan data pembanding internal untuk penentuan harga wajar atau laba wajar. apabila data pembanding internal yang tersedia bersifat insidental, maka data pembanding internal dimaksud hanya dapat dipergunakan dalam transaksi

yang bersifat insidental antara wajib pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan melakukan analisis fungsi. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis fungsi adalah:

- a) Struktur organisasi dan posisi perusahaan yang diuji dalam kelompok usaha serta manajemen mata rantai (*supply chain management*) kelompok usaha;
- b) Fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti desain, pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen serta karakteristik utama perusahaan seperti jasa maklon (*toll manufacturing*), manufaktur dengan fungsi dan risiko terbatas (*contract manufacturing*), dan manufaktur dengan fungsi dan risiko penuh (*fully fledge manufacturing*); jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan Harta Tidak Berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi;
- c) Risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan.

2) Memilih Metode Penentuan Harga Transfer yang Tepat

Penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai

(*The Most Appropriate Method*). Metode penentuan harga transfer yang dapat diterapkan adalah :

- a) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang Tidak Mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/ CUP*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode ini adalah ketika barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.
- b) Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/ RPM*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode ini adalah ketika tingkat kesebandingan yang tinggi diantara transaksi antara wajib pajak yang

mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi antara wajib pajak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda dan pihak penjual kembali (*reseller*) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.

- c) Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode ini adalah barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (*joint facility agreement*) atau kontrak jual-beli jangka panjang (*long term buy and supply agreement*) antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- d) Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/ PSM*) adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*Transactional Profit Method Based*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan

istimewa. Metode pembagian laba (*Profit Split Method/ PSM*) secara khusus hanya dapat diterapkan dalam kondisi transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah atau terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat.

- e) Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin method/ TNMM*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya terhadap penjualan, aktivas, atau dasar lainnya atas transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Kondisi yang tepat dalam menerapkan ini adalah salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa melakukan kontribusi yang khusus atau salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain

3) Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Harga wajar metode penentuan harga transfer dapat ditentukan dalam bentuk harga tunggal (*single price*) atau dalam bentuk rentang harga wajar. Rentang harga wajar merupakan rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi syarat bahwa transaksi atau data

pembandingan yang digunakan dapat diandalkan dan didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga atau laba tunggal tidak dapat dilakukan.

4) Melakukan Dokumentasi Langkah-langkah Penentuan Harga Wajar

Wajib Pajak wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan analisis kesebandingan dan penentuan pembandingan, penggunaan data pembandingan internal dan/atau data pembandingan eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Pemeriksaan *Transfer Pricing* atas Transaksi Bunga Pinjaman

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal pajak Nomor Kep -01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa disebutkan bahwa selain melakukan penentuan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman, wajib pajak akan dilakukan pemeriksaan dengan melakukan analisis rasio dan audit program pemeriksaan.

a. Melakukan Analisis Rasio

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendeteksi struktur permodalan sehubungan dengan peminjaman dan pembebanan bunga yang dapat diperkenankan, sehingga diperlukan angka-angka rasio. Angka-angka rasio tersebut dibandingkan dengan rasio-rasio berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak pada tahun sebelumnya. Penentuan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman dilakukan analisis rasio hutang terhadap modal

sendiri, pelaksanaannya adalah membagi berapa jumlah hutang dibagi dengan berapa jumlah modal sendiri. Rasio ini dapat dipecah sebagai berikut:

$$\frac{\text{hutang dari pihak afiliasi}}{\text{modal sendiri}} \quad \text{dan} \quad \frac{\text{hutang dari pihak ketiga}}{\text{modal sendiri}}$$

b. Melakukan Audit Program Pemeriksaan Utang Usaha

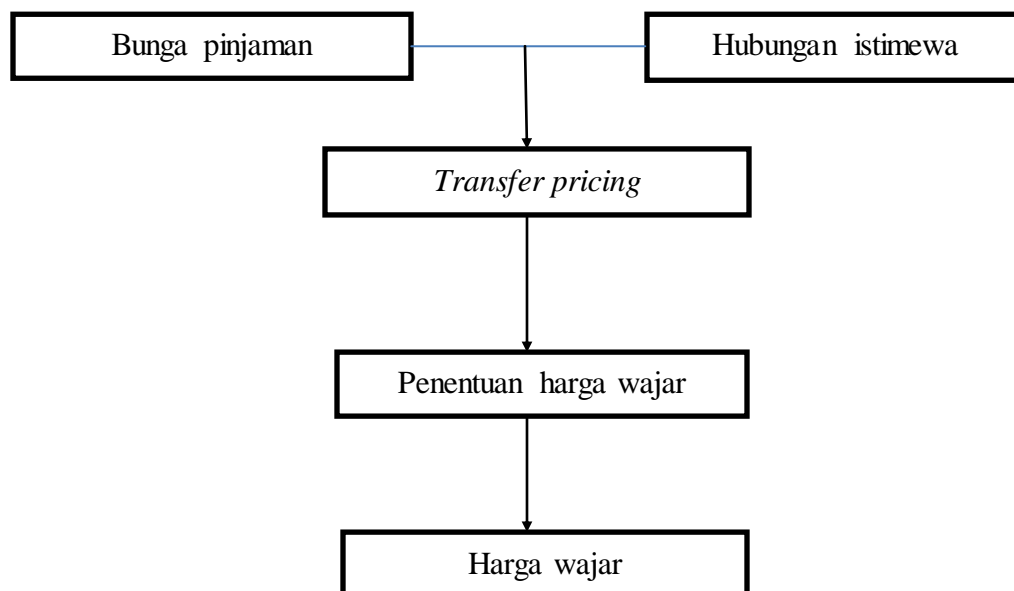
Audit ini bertujuan untuk menentukan kelayakan utang usaha yang berasal dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, dengan melakukan Prosedur Pemeriksaan:

- 1) Periksa buku besar/pembantu utang usaha,
- 2) Periksa apakah kreditur yang mempunyai hubungan istimewa,
- 3) Apabila ada, periksa kewajaran pembebanan harga pembeliannya,
- 4) Apabila barang/jasa yang dibeli terdapat di pasaran bebas, maka lakukan konfirmasi ke sumber informasi,
- 5) Apabila barang/jasa yang dibeli tidak dijual di pasar bebas, maka lakukan metode pemeriksaan,
- 6) Pembayaran utang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (persero) yang melebihi harga beli dianggap pembayaran dividen.

Perusahaan yang telah melakukan penentuan harga wajar atas transaksi yang telah dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, perusahaan tetap akan diperiksa oleh DJP atas kebenaran dokumentasi penentuan harga wajar yang telah disusun.

9. Kerangka Pemikiran Penelitian

Setiap transaksi pada pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing* telah terindikasi praktik *transfer pricing*, termasuk transaksi bunga pinjaman. Penetapan harga setiap transaksi agar dikatakan wajar, pihak Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan untuk menyusun dokumen *transfer pricing* bagi setiap wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan nilai total transaksi diatas Rp10 Milyar dalam satu tahun. Sesuai inti dari kerangka pemikiran penelitian, dalam penyusunan dokumen *transfer pricing* terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan harga wajar bunga pinjaman. Gambar 2.1 berikut menampilkan kerangka pemikiran penelitian ini:



Gambar 2.1 Gambar Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2016

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Menurut Sugiyono (2012:3), metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Metode kualitatif secara signifikan dapat mempengaruhi substansi, artinya metode ini mengambil data melalui peneliti sebagai instrumen utama dengan menggali informasi dari informan, obyek, dan subyek penelitian.

Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari sebuah penelitian (Djajasudarma, 2006:11). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan suatu bahasa memerlukan informan, oleh karena itu dalam penelitian ini jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini mendeskripsikan fakta dan keadaan yang terjadi saat penelitian serta menyuguhkan apa adanya tentang bagaimana penentuan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman PT X dari perusahaan induk melalui interpretasi dokumen *transfer pricing* dan proses penggalian informasi lebih mendalam kepada pihak informan.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah adalah sebutan pokok masalah untuk penelitian kuantitatif, sedangkan untuk penelitian kualitatif disebut fokus penelitian (Sugiyono, 2012:2009). Penelitian ini mengambil batasan masalah yaitu:

1. Mengetahui cara PT X menentukan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman dari perusahaan induk.
 - a) Analisis kesebandingan dan menentukan pembandingan.
 - b) Memilih metode penentuan harga transfer.
 - c) Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
 - d) Dokumentasi langkah-langkah penentuan harga wajar.
2. Mengetahui kesesuaian penentuan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman yang dilakukan oleh PT X dengan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing*.
 - a) Kesuaian analisis kesebandingan dan menentukan pembandingan dengan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing*.
 - b) Kesuaian pemilihan metode penentuan harga transfer dengan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing*.
 - c) Kesuaian penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing*.
 - d) Kesuaian dokumentasi langkah-langkah penentuan harga wajar dengan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah lingkungan dari PT X yang merupakan perusahaan penanaman modal asing dari sebuah perusahaan di Jepang, PT X berlokasi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada divisi perpajakan PT X, yang dimaksud dari divisi perpajakan tersebut adalah seluruh staf yang berada di PT X yang bekerja di divisi perpajakan, dengan alasan divisi perpajakan adalah bidang yang menangani masalah *transfer pricing*, sehingga tepat sesuai dengan tema yang diambil.

D. Sumber Data

Peneliti menggunakan data yang bersifat primer dan sekunder, berikut maksud dan unsur dari kedua sumber data tersebut:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan (Umar, 2003:56). Penelitian ini menggunakan data primer dari dokumen *transfer pricing* PT X tahun 2012 dan penggalan informasi lebih mendalam melalui wawancara dengan informan tentang penentuan harga wajar bunga pinjaman.
2. Data sekunder merupakan data yang sudah ada, data tersebut sudah dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan-tujuan yang tidak mendesak (Narimawati, 2008:94). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung berupa Undang-Undang *Transfer Pricing* serta jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan *transfer pricing* yang harus diolah terlebih dahulu agar menjadi data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013:224). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan informan sebagai sumber data secara terstruktur dan mendalam. Menurut Bungin (2007:108) wawancara mendalam adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada divisi perpajakan PT X dengan menggunakan pedoman wawancara, guna mendapatkan data yang lebih banyak dan mendalam sehingga menguatkan hasil penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penelitian (Nawawi, 2005:133).

Sedangkan menurut Arikunto (2002:206), dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mencari data yang berupa catatan,

transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi penelitian ini diperoleh dari dokumen *transfer pricing* PT X dan juga arsip lampiran penunjang dokumen tersebut seperti catatan transaksi hutang PT X dari perusahaan induk yang lebih rinci.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama atau alat penelitian utama adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logikanya (Sugiyono, 2009:305). Instrumen penelitian ini adalah:

1. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, karena kepekaan dari peneliti untuk mengumpulkan dan mengolah data dilakukan dengan sebaik mungkin agar mendapat data yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Pedoman wawancara, digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
3. Alat penelitian yang berupa buku catatan dan alat perekam digunakan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Buku catatan digunakan untuk mencatat penemuan dalam penelitian, dan alat perekam sebagai pembantu dalam merekam setiap proses dari pengumpulan data hingga pengolahan data khususnya dalam melakukan wawancara.

G. Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, yaitu membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat pertanyaan yang berbeda. Triangulasi sumber dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2010:330-331). Tujuan dari triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah membandingkan dan mengecek hasil wawancara dengan dokumen *transfer pricing* PT X tahun 2012 yang sebelumnya telah disusun.

H. Teknik Analisis Data

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjunksan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.

Menurut Sugiyono (2009:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data prosedur penyusunan dokumen *transfer pricing* dalam menentukan harga wajar yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka. Langkah-langkahnya adalah reduksi data, penyajian data dengan bagan dan teks, kemudian penarikan kesimpulan. Langkah - langkah yang digunakan peneliti untuk analisis data adalah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Emzir, 2010:129), berikut analisis kegiatan analisis data kualitatif tersebut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti komputer, reduksi data menggunakan alat elektronik dapat dilakukan dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu yang berguna untuk merangkum suatu data dan menghilangkan data yang tidak digunakan.

2. Model Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. *Display* data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya *didisplaykan* pada laporan akhir penelitian.

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Penelitian kualitatif diharapkan memiliki kesimpulan yang merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT X

1. Sejarah Pendirian PT X

Industri otomotif diklasifikasikan sebagai industri teknologi dan sebagai industri padat modal, artinya industri otomotif merupakan jenis industri yang menggunakan modal yang besar serta proses produksi dalam industri menggunakan mesin sehingga menghasilkan produk yang mutakhir dan canggih. Modal yang besar menjadi salah satu alasan masih sedikitnya jumlah produsen otomotif sehingga pangsa pasar industri otomotif masih oligopolistik atau didominasi oleh perusahaan besar seperti Honda, Nissan, Toyota, Mazda, dan lainnya. Persaingan harga produk otomotif semakin ketat, membuat perusahaan otomotif menekan biaya produksi, salah satu langkah yang diambil oleh perusahaan besar industri otomotif adalah mengambil bahan dari pemasok di kawasan Asia yang memiliki harga lebih kompetitif.

PT X merupakan salah satu perusahaan aksesoris otomotif yang berada di kawasan Asia yaitu Indonesia. PT X didirikan pada tanggal 6 Februari 2004 sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Perusahaan ini berlokasi di Jawa Timur dan merupakan anak perusahaan dari *X Corporation*, yang berada di Jepang. Terhitung pada tahun 2012 PT X memiliki 84 karyawan tetap dengan struktur kepemilikan saham sebesar 60% yang dimiliki oleh *X Corporation* dari

seluruh total saham PT X. Produk aksesoris otomotif yang dihasilkan oleh PT X adalah karpet dan tikar karet, dalam menjalankan bisnisnya PT X melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk proses pembelian bahan baku, penyewaan gedung, bunga pinjaman, dan penjualan barang jadi.

2. Kegiatan Usaha dan Produk yang dihasilkan PT X

PT X melakukan kegiatan usaha dengan membeli bahan baku dari pemasok lokal dan luar negeri. Bahan baku yang telah dibeli akan diproses hingga menjadi produk sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Produk yang dihasilkan oleh PT X akan dijual pada perusahaan otomotif yang memproduksi mobil, penjual grosir atau eceran komponen otomotif (produksi mobil), dan penjual grosir atau eceran komponen otomotif untuk suku cadang. Berikut produk yang dihasilkan PT X:

a. Karpet

Karpet mobil fungsi dasarnya ialah untuk alas dek dari kaki penumpang atau pengemudi yang bisa memberikan kenyamanan dalam mengendarai mobil, dan juga dapat memberi nilai keindahan tampilan interior di dalam mobil. Karpet mobil yang diproduksi PT X diproses dari bahan baku yang dibeli dari perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

b. Tikar Karet

Berbeda dengan karpet pada produk sebelumnya produk ini sangat mudah untuk dibersihkan apabila keadaan mobil sedang kotor karena bahan yang digunakan dari karet. Selain sebagai alas, tikar ini juga berfungsi agar

cairan tidak bisa masuk ke rangka mobil karena terbuat dari karet yang tidak bisa ditembus air.

3. Modal Saham PT X Tahun 2012

Jumlah modal saham seluruhnya yang dimiliki oleh PT X sebesar Rp20.376.000.000,00 dengan jumlah total 24.000 lembar saham yang dimiliki oleh 2 pihak yaitu *X Corporation* sebagai perusahaan induk dan PT BB. Komposisi dari kepemilikan saham PT X hingga pada 31 Desember 2012 adalah 60% dimiliki oleh *X Corporation* dengan jumlah 14.400 lembar saham dan 40% dimiliki oleh PT BB dengan jumlah 9.600 lembar saham. Komposisi kepemilikan modal saham dapat dilihat dari Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Komposisi Kepemilikan Saham PT X

No.	Pemilik Saham	Jumlah Lembar Saham	Persentase	Jumlah saham (Rupiah)
1.	<i>X Corporation</i>	14.400	60%	12.225.600.000
2.	PT BB	9.600	40%	8.150.400.000
	Total	24.000	100%	20.376.000.000

Sumber: Dokumen *Transfer Pricing* PT X tahun 2012

4. Ringkasan Keuangan PT X Tahun 2012

Tahun 2012 PT X dalam melakukan kegiatan usahanya mengalami kerugian sebesar Rp388.030.617,00 dari laba operasional Rp1.320.320.949,00 setelah dikurangi biaya lain-lain sebesar Rp1.708.351.566,00 yang terdiri dari

biaya bunga, kerugian nilai tukar kurs valuta asing, dan klaim. Gambaran laporan keuangan PT X secara umum dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut:

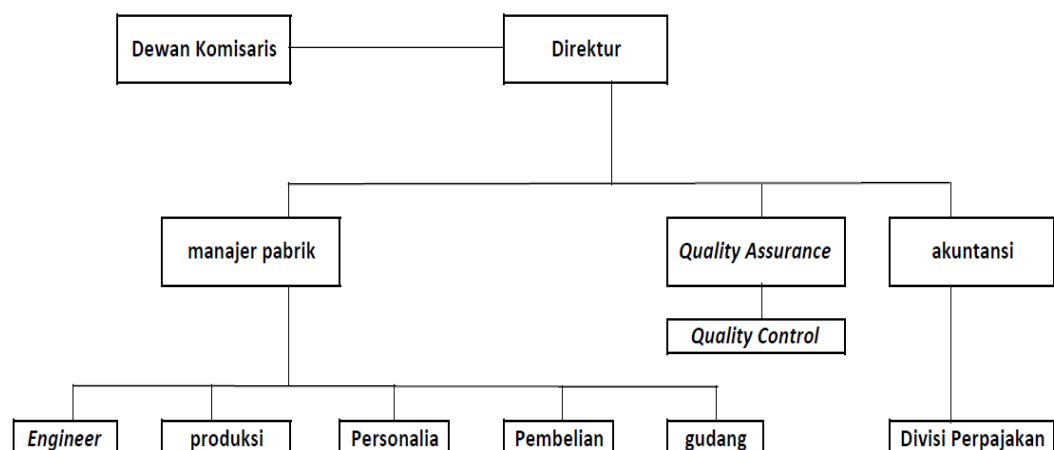
Tabel 4.2 Gambaran Laporan Keuangan PT X Tahun 2012

Nama Akun	Jumlah (Rupiah)
Penjualan	62.381.045.987
Harga Pokok Produksi	57.187.500.369
Laba Kotor	5.193.545.618
Biaya Operasional	(3.873.224.669)
Laba Operasional	1.320.320.949
Biaya Lain-Lain	(1.708.351.566)
Laba Bersih (Rugi)	(388.030.617)

Sumber: Dokumen *Transfer Pricing* PT X tahun 2012

5. Struktur Organisasi PT X Tahun 2012

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian tugas dan wewenang setiap bagian. Struktur organisasi PT X Tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT X Tahun 2012

Sumber: Dokumen *Trasnfer Pricing* PT X Tahun 2012

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh setiap jabatan dari struktur organisasi PT X adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

- 1) Mengawasi jalannya perusahaan secara berkala, serta mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi tentang hasil yang diperoleh perusahaan,
- 2) Menentukan siapa yang menjadi Direktur,
- 3) Menyetujui *planning* yang akan diajukan oleh Direktur,
- 4) Memberikan masukan-masukan yang berguna bagi perusahaan.

b. Direktur

- 1) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan,
- 2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer),
- 3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan,
- 4) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan,
- 5) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh dewan komisaris.

c. Manajer Pabrik (*Factory Manager*)

- 1) Menciptakan sebuah produk, baik dalam pembuatan produk mentah, produk setengah jadi, atau produk jadi,

- 2) Struktur kerja yang dimiliki oleh seorang *factory manager* berada di bawah garis jabatan Direktur,
- 3) *Factory manager* berkewajiban untuk melaporkan tugasnya secara langsung pada Direktur.

d. *Quality Assurance (QA)*

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal,
- 2) Melakukan audit eksternal terhadap pemasok,
- 3) Melakukan penilaian secara jujur terhadap kinerja perusahaan,
- 4) Pembuatan prosedur tetap sebagai petunjuk operasional.

e. *Quality control (QC)*

- 1) Memantau perkembangan semua produk yang diproduksi oleh perusahaan,
- 2) Bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas dalam produk dan jasa perusahaan,
- 3) Penanganan produk material, *quality control* harus memverifikasi kualitas produk dengan bantuan parameter seperti berat badan, tekstur dan sifat fisik lain dari perusahaan.
- 4) Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah dan isu-isu mengenai kualitas produk.

f. Akuntansi

- 1) Bertanggung jawab pada urusan piutang, utang, penagihan, dan pembukuan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan,

- 2) Memeriksa kebenaran penulisan dan perhitungan kuitansi dan surat jalan,
- 3) Memeriksa batas piutang dari setiap perusahaan,
- 4) Menetapkan metode yang digunakan dalam pencatatan akuntansi.

g. Divisi Perpajakan

- 1) Bertanggung jawab menyusun SPT Tahunan perusahaan,
- 2) Memeriksa kewajiban perpajakan perusahaan,
- 3) Melakukan rekonsiliasi pajak perusahaan,
- 4) Menyusun dokumen *transfer pricing* perusahaan.

h. Bagian Gudang

- 1) Mempersiapkan barang yang akan dikirim,
- 2) Bertanggung jawab atas penyimpanan persediaan, barang setengah jadi, stok, dan barang yang diterima dari retur penjualan,
- 3) Mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan,
- 4) Mengatur retur penjualan dan retur pembelian,
- 5) Membuat bukti barang masuk dan keluar.

i. Personalia

- 1) Membuat perencanaan pegawai sesuai kebutuhan dari setiap departemen,
- 2) Bertanggung jawab dalam memilih dan mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan,

- 3) Memberikan pelatihan kepada pegawai agar mempunyai motivasi kerja dan menemukan solusi persoalan yang dihadapi oleh pegawai perusahaan,
- 4) Menilai dan mengukur kinerja pegawai,
- 5) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Direktur.

j. Pembelian

- 1) Menandatangani segala urusan pembelian, penerimaan, dan gudang,
- 2) Bertanggung jawab atas segala urusan yang berhubungan dengan pembelian,
- 3) Memberikan kebijaksanaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembelian dan gudang, Mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih,
- 4) Membuat pemesanan pembelian dan memesan barang kepada pemasok.

k. Engineer

- 1) Memberikan petunjuk kepada tim, dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis segera setelah kontrak fisik ditandatangani,
- 2) Memberikan petunjuk kepada tim dalam melaksanakan pekerjaan, menyiapkan rekomendasi secara terinci atas usulan desain, termasuk data pendukung yang diperlukan,
- 3) Menjamin bahwa semua isi dari kerangka acuan pekerjaan ini akan dipenuhi dengan baik yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan major serta pemeliharaan jalan,

- 4) Menjamin semua pelaksanaan detail teknis untuk pekerjaan major tidak akan terlambat selama masa mobilisasi untuk masing-masing paket kontrak dalam menentukan lokasi, tingkat serta jumlah dari jenis-jenis pekerjaan yang secara khusus disebutkan dalam dokumen kontrak,
- 5) Membantu tim di lapangan dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan kontraktor, termasuk pengendalian pemenuhan waktu pelaksanaan pekerjaan.

6. Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan PT X

a. *X Corporation*

X Corporation merupakan perusahaan induk dari PT X, berlokasi di Jepang memiliki 1.100 karyawan dengan total modal 1 juta JPY. *X Corporation* merupakan perusahaan global suku cadang otomotif, aksesoris, dan perlengkapan otomotif. *X Corporation* mendesain, mengembangkan, memproduksi, serta menjual eksterior plastik, ikat pinggang mobil, serta aksesoris asli untuk *dealer* mobil. *X Corporation* melayani enam kategori utama produk, ada eksterior plastik, jendela ikat pinggang/produk logam, cetakan, listrik/komponen elektronik, tekstil, dan bahan kimia.

Seiring berjalan waktu, *X Corporation* mengembangkan bisnis di luar negeri. *X Corporation* membangun anak perusahaan dan perusahaan grup asosiasi di Amerika, Eropa, Cina, dan negara ASEAN salah satunya adalah PT X. Pada tahun 2012 tercatat PT X melakukan transaksi dengan X

Corporation berupa pembelian bahan baku, penjualan produk, pengiriman contoh produk dan biaya pengiriman, serta bunga pinjaman.

b. PT BB

PT BB didirikan pada tanggal 8 Maret 1983 berlokasi di Jawa Timur. PT BB menjadi promotor pembuat benang dan karpet di kawasan ASEAN karena PT BB telah memenuhi standar kerja internasional yang ketat dari *American Standart Testing and Material* (A.S.T.M), yang berfungsi sebagai bukti komitmen terhadap kualitas, serta memiliki sertifikat *International Standart Organization* (ISO) sejak tahun 1997. Perusahaan ini memiliki modal sebesar 50 milyar, dan memiliki karyawan sebanyak 485 orang. Produksi yang dilakukan PT BB meliputi produk karpet, matras, ubin, dan benang.

PT BB sebagai salah satu pemilik modal saham PT X melakukan beberapa transaksi dengan PT X. Pada tahun 2012 PT X melakukan transaksi berupa penyewaan gedung, serta pembelian bahan baku, sehingga PT X juga melakukan penentuan harga wajar atas transaksi tersebut.

c. AA Corporation

Didirikan pada tahun 2007 berlokasi di Amerika Serikat, *AA Corporation* adalah perusahaan swasta yang dikategorikan pada usaha penjual perlengkapan dan suku cadang mobil grosir. *AA Corporation* memiliki jumlah karyawan sekitar 50 orang, dengan total modal sebesar 40.000 USD. *AA Corporation* memiliki hubungan istimewa dengan PT X

karena *AA Corporation* adalah pemilik saham mayoritas dari *X Corporation* yang berstatus sebagai perusahaan induk PT X, sehingga *AA Corporation* memiliki hubungan istimewa dengan PT X secara tidak langsung. Pada tahun 2012 PT X melakukan sebagian transaksi penjualan produk kepada *AA Corporation*.

B. Penyajian Data

PT X menentukan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman dengan melakukan analisis kesebandingan dan mencari pembanding, memilih metode harga transfer, menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, serta melakukan dokumentasi atas langkah penentuan harga wajar. Berikut data penentuan harga wajar yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada staf divisi perpajakan PT X sebagai informan:

1. Analisis Kesebandingan dan Mencari Pembanding

a. Analisis Rantai Pemasok

Rantai pembuatan mobil dimulai dari pemasok suku cadang dan bagian mobil, seperti PT X sebuah perusahaan produksi aksesoris otomotif karpet dan tikar karet yang akan digunakan oleh perusahaan otomotif dalam melakukan produksi mobil seperti Nissan, Honda, Toyota, Mitsubishi, dan Mazda. PT X memasok komponen otomotif secara khusus diproduksi untuk konfigurasi kendaraan yang nantinya akan diintegrasikan bagian-bagian dan komponen dalam sistem perusahaan otomotif. Komponen yang terintegrasi kemudian dijual ke perusahaan otomotif (produksi mobil) yang akan dirakit hingga selesai menjadi produk mobil mereka.

PT X melakukan kegiatan usaha dengan membeli bahan baku dari pemasok lokal dan luar negeri, untuk pemasok PT X yang berada di Indonesia yaitu PT BB. Pembelian bahan baku harus sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dari pihak pembeli produk. Bahan baku yang telah dibeli akan diproses hingga menjadi produk sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Produk yang dihasilkan oleh PT X akan dijual kepada perusahaan otomotif yang memproduksi mobil, penjual grosir atau eceran komponen otomotif untuk produksi sebuah mobil atau untuk suku cadang saja. Tercatat pada tahun 2012, pembeli sebagian produk PT X adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu *X Corporation* yang berada di Jepang dan *AA Corporation* yang berada di Amerika.

b. Analisis Fungsi, Aset, dan Risiko (FAR)

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung oleh PT X dan pihak afiliasi atas setiap transaksi. Informasi ini digunakan dalam pertimbangan pemilihan perusahaan independen yang sebanding. Analisis kesebandingan perusahaan yang sebanding dapat dimanfaatkan untuk menentukan nilai wajar transaksi PT X. Berikut analisis fungsi, aset, dan risiko dari dokumen *transfer pricing* PT X tahun 2012:

1) Fungsi Pembelian Bahan Baku

PT X melakukan sendiri fungsi pembelian bahan baku tikar mobil. Pembelian dilakukan melalui pihak pemasok (*supplier*) domestik dan luar

negeri. Jumlah pembelian bahan baku yang diperoleh PT X dari pihak independen lebih sedikit daripada pembelian bahan baku yang diperoleh dari pihak afiliasi. Pembelian, perencanaan, dan juga persetujuan pembelian bahan baku dilakukan oleh departemen pembelian PT X tanpa persetujuan dari perusahaan induk dalam menjalankan fungsi tersebut.

2) Fungsi Persediaan atau Gudang

PT X memiliki sendiri bangunan sebagai gudang, fungsi gudang PT X sepenuhnya mencakup kegiatan menerima, penyimpanan, dan mendistribusikan persediaan untuk pengguna gudang. Pengendalian persediaan dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi dan diawasi oleh bagian gudang. Persediaan bahan baku disimpan di gudang selama sekitar dua bulan dan akan dikeluarkan untuk dilakukan proses produksi lebih lanjut.

3) Fungsi Mesin dan Perlengkapan

Mesin dan perlengkapan dibeli dari pihak independen. PT X bertanggung jawab penuh atas kepemilikan serta penggunaan mesin dan perlengkapan yang dimiliki. Tanggung jawab ini termasuk memberikan otorisasi untuk belanja mesin dan perlengkapan, anggaran pembelian mesin dan perlengkapan, serta negosiasi setiap pembelian mesin dan perlengkapan.

4) Fungsi Perencanaan Produksi

PT X memiliki tanggung jawab untuk membuat jadwal proses produksi. Jadwal produksi sangat tergantung dari produk yang dipesan

oleh pemesan produk. PT X hanya melakukan proses produksi, sedangkan mengenai harga produk, waktu produksi, kuantitas dan kualitas produksi harus ditentukan terlebih dahulu oleh *X Corporation* sebagai perusahaan induk dan kemudian diserahkan kepada PT X untuk proses produksi.

5) Fungsi Produksi dan Proses *Engineering*

Proses produksi telah dikembangkan oleh *X Corporation* dan diberikan kepada PT X, sehingga aktivitas perusahaan sangat terbatas untuk meningkatkan tingkat efisiensi produksi. Semua produk didesain oleh *X Corporation*, PT X hanya menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh *X Corporation* tanpa melibatkan pihak lain. PT X bertanggung jawab untuk menjaga peralatan produksi, tahapan proses produksi, pengendalian produksi, dan kemasan. Label produk PT X menggunakan merek milik masing-masing pelanggan PT X (seperti Nissan dan Toyota).

6) Fungsi Kemasan dan Pelabelan

Fungsi kemasan dan pelabelan pada semua produk yang dihasilkan, dilakukan oleh PT X. Kegiatan kemasan dan pelabelan dilakukan di dalam pabrik. PT X bertanggung jawab penuh terkait kegiatan kemasan dan pelabelan.

7) Fungsi *Quality Control*

Quality control meliputi kegiatan memastikan bahwa kualitas produk sesuai dengan standar yang telah ditentukan. *Quality control* berkaitan dengan penerapan standar kualitas produk, penolakan unit yang

tidak memenuhi standar dalam batas toleransi, dan juga memberikan tanggapan kepada manajemen dari hasil produksi. PT X bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses produksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Petugas *quality control* PT X juga bertanggung jawab untuk memastikan standar kualitas semua barang yang dihasilkan dalam setiap langkah dari proses produksi yang telah ditentukan. Kualitas produk jadi harus memenuhi standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh *X Corporation*.

8) Fungsi Pengiriman Produk

PT X menyimpan produk jadi di gudang, dan kemudian dikirim ke pelanggan. PT X bertanggung jawab untuk membuat jadwal pengiriman untuk pembelian maupun penjualan produk. Dalam proses pengiriman, pemuatan dan pembongkaran dilakukan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan pembeli produk. Untuk pembelian dan penjualan dalam negeri, pengiriman dilakukan melalui jalur darat dengan menggunakan mobil truk, sedangkan transaksi internasional, pengiriman dilakukan melalui jalur laut (untuk beberapa pelanggan, transportasi udara juga digunakan).

Fungsi logistik dilakukan oleh PT X untuk semua penjualan dan pembelian barang di Indonesia. Fungsi pengiriman produk dalam kegiatan impor dan ekspor dilakukan oleh PT X. Kegiatan impor pengiriman dilakukan dari tempat penjual bahan baku sampai pelabuhan Jawa Timur (biaya pengiriman, asuransi, dan biaya angkut dibayar oleh PT X),

sedangkan pengiriman produk tujuan ekspor dilakukan dari pelabuhan Jawa Timur hingga tempat pembeli produk (biaya pengiriman, asuransi, dan biaya angkut dibayar oleh pembeli produk).

9) Fungsi Penelitian dan Pengembangan (R&D)

PT X tidak melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan desain produk dilakukan oleh konsumen akhir (seperti Nissan, Toyota, dan sebagainya), dengan demikian kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh PT X hanya melayani persyaratan yang ditentukan dari pelanggan. Usulan desain produk disampaikan kepada PT X selanjutnya desain yang diusulkan kepada PT X akan dilakukan evaluasi dan diolah lebih lanjut.

10) Fungsi Pemasaran

PT X tidak melakukan fungsi kegiatan pemasaran dan strategi pengembangan produk. PT X berfokus pada peningkatan volume penjualan masing-masing kategori produk sesuai dengan jenis produk yang dipesan oleh pelanggan, sebaliknya pemasaran dan strategi pengembangan produk dilakukan oleh *X Corporation* selaku perusahaan induk.

11) Fungsi Penjualan dan Distribusi

Fungsi penjualan dan distribusi dilakukan sendiri oleh PT X. Proses penjualan dan distribusi dimulai dari penandaan kontrak pemesanan produk sesuai dengan keinginan pemesan. Spesifikasi produk yang

dipesan diproses lebih lanjut oleh PT X, sebelum produk siap dikirim ke pemesan produk, dokumen pendukung harus disiapkan oleh bagian administrasi.

12) Fungsi Administrasi dan Layanan lainnya.

Fungsi administrasi dalam menjalankan kegiatan usaha semua dilakukan oleh PT X, fungsi ini tidak ada kaitanya dengan perusahaan induk. Fungsi administrasi mencakup juga fungsi akuntansi, keuangan, SDM, pajak, dan hukum, dan semua dilakukan sendiri oleh PT X.

13) Fungsi Layanan Purna Jual

Fungsi layanan purna jual dilakukan dengan memberikan perbaikan, pemeliharaan, dan klaim garansi terkait dengan produk cacat. Tidak ada layanan penjualan tertentu setelah diatur dalam kontrak, tapi dalam kasus keluhan pelanggan produk PT X karena kesalahan proses produksi, PT X akan memberikan ganti rugi yang berhubungan dengan klaim dari pelanggan.

14) Aset Berwujud

Analisis aset digunakan untuk mengidentifikasi siapa pemilik dari kedua aset yaitu aset berwujud dan tidak berwujud. Analisis aset dilakukan dengan membedakan kepemilikan aset secara hukum dan pemilik aset secara modal. Kepemilikan secara hukum biasanya berkaitan dengan ditunjukan dokumentasi kepemilikan, sedangkan kepemilikan secara modal berkaitan dengan kegiatan membeli aset berwujud atau aset tidak berwujud. Misalnya, kepemilikan secara modal di nama produk dan logo

yang dikirim dari perusahaan produksi kepada perusahaan distribusi sebagai strategi pemasaran dan biaya promosi dari perusahaan produksi, atau nama produk dan logo tersebut ditanggung secara eksklusif oleh perusahaan distribusi.

Aset yang dimiliki oleh PT X sesuai neraca pada tanggal 31 Desember 2012 yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Aset yang dimiliki oleh PT X tahun 2012

Jenis Aset	Harga Perolehan (Rupiah)	Depresiasi (Rupiah)	Nilai Aset (Rupiah)
Bangunan	2.139.480.121	822.610.331	1.316.869.790
Mesin	11.410.22.668	7.519.932.031	3.890.296.637
Perlengkapan Pabrik	1.842.843.356	1,622.065.202	220.778.154
Instalasi Pabrik	212.727.878	183.126.224	29.601.654
Peralatan Kantor	524.151.100	487.979.774	36.171.326
Peralatan Telekomunikasi	44.098.980	41.114.872	2.984.108
Kendaraan Bermotor	576.445.826	398.032.936	178.412.890
Total	16.749.975.929	11.074.891.371	5.675.084.558

Sumber: Dokumen *Transfer Pricing* PT X tahun 2012

Aset berwujud yang digunakan oleh PT X berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan perlengkapan. PT X memiliki pabrik dan gudang yang berlokasi di Jawa Timur sebagai tempat dilakukan proses produksi dan menyimpan produk. PT X juga memiliki mesin, peralatan kantor dan telekomunikasi, dan kendaraan untuk mendukung proses produksi pada tahun 2012.

15) Aset Tidak Berwujud

PT X tidak memiliki aset tidak berwujud yang berharga karena aset tidak berwujud diperoleh dari perusahaan induk. Kedua aset tidak berwujud baik produksi atau pemasaran tidak memiliki merek dan paten, sehingga aset tidak berwujud yang terkait dengan kegiatan usaha PT X semua dipegang oleh *X Corporation* atau produsen mobil lainnya.

16) Risiko Pasar

Risiko pasar terkait dengan risiko yang timbul akibat ketidakpastian di pasar, termasuk fluktuasi permintaan dan harga. Risiko pasar terjadi ketika sebuah perusahaan dengan kondisi penjualan yang rugi karena meningkatnya persaingan di pasar, atau kondisi permintaan pasar yang merugikan, atau ketidakmampuan untuk mengembangkan pasar.

PT X memiliki kestabilan yang signifikan terhadap risiko ini, selama penjualan produk jadi dilakukan kepada pelanggan independen yang bersangkutan. Risiko disebabkan karena meningkatnya persaingan yang terjadi di pasar, tekanan harga pokok produksi, perubahan pola permintaan dan kebutuhan pelanggan, juga kesulitan menemukan atau menembus pasar. PT X juga bisa memiliki risiko pasar yang tinggi ketika menjual produknya ke *X Corporation*, hal ini karena *X Corporation* juga harus menanggung risiko pasar apabila produk yang dibeli dari PT X terjadi kerusakan pada saat penjualan produk tersebut dilakukan pada pasar terbuka.

17) Risiko Persediaan

Risiko persediaan mengacu pada potensi kerugian yang berkaitan dengan persediaan produk. Sebagai produsen barang jadi, PT X menanggung risiko persediaan atas kelebihan stok bahan baku maupun barang dalam proses, dan juga bisa menanggung kerugian laba kotor jika persediaan tidak segera dikirim kepada pemesan atau penghentian model oleh pihak produsen mobil.

PT X juga mempertahankan persediaan barang jadi dengan menyimpan, mengatur sistem pengeluaran, serta menanggung risiko yang terjadi pada barang yang disimpan. Risiko kerusakan barang yang terjadi dalam proses pergudangan sepenuhnya ditanggung oleh PT X. Manajer persediaan PT X melakukan prosedur kontrol yang efisien agar meminimalkan risiko persediaan yang dihadapi oleh PT X pada kerusakan penyimpanan barang jadi.

18) Risiko Utang dan Piutang Tak Tertagih

Risiko utang pelanggan berhubungan dengan potensi kerugian yang terjadi karena piutang tidak tertagih. Risiko ini dapat terjadi pada transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi maupun transaksi yang dilakukan dengan pihak independen baik pada transaksi penjualan barang jadi maupun pembelian bahan baku, sehingga PT X memiliki risiko pada utang dan piutang tak tertagih karena tahun 2012 PT X melakukan transaksi penjualan produk dan pembelian bahan baku.

19) Risiko Valuta Asing

Risiko valuta asing terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terkait dengan pembelian atau penjualan yang dilakukan dengan mata uang asing. PT X melakukan pembayaran dan menerima pembayaran dari X *Corporation* untuk impor bahan baku dan ekspor produk dengan menggunakan mata uang asing. Setiap transaksi yang dapat merugikan dalam penggunaan valuta asing secara langsung berdampak pada arus kas dari PT X, sehingga PT X memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi atas nilai tukar mata uang karena PT X dalam kegiatan operasionalnya menggunakan mata uang asing, sementara dalam laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah.

20) Karakteristik Perusahaan Menurut Analisis FAR

Karakteristik perusahaan manufaktur dibedakan menjadi tiga jenis yaitu perusahaan dengan fungsi dan risiko penuh (*fully fledge manufacturing*), perusahaan dengan fungsi dan risiko terbatas atau disebut perusahaan kontrak (*contract manufacturing*), dan perusahaan jasa maklon (*toll manufacturing*). Menurut analisis terhadap fungsi, aset, dan risiko PT X yang telah dilakukan, dapat digolongkan karakter perusahaan manufaktur PT X. Tabel 4.4 berikut akan menggolongkan PT X pada salah satu dari ketiga jenis perusahaan manufaktur tersebut sesuai dengan analisis fungsi, aset, dan risiko yang telah dilakukan:

Tabel 4.4 Karakteristik Perusahaan Manufaktur PT X

Karakter	Perusahaan Lengkap	Perusahaan Kontrak	Perusahaan Maklon
Fungsi yang Dilakukan	semua fungsi	Terbatas pada pengadaan bahan	Terbatas pada proses produksi
Pembuatan Keputusan	Ya	Minimal	Tidak
Aktivitas Perusahaan	Ya	Ya	Ya
Manajemen Persediaan	Ya	Ya	Ya
Kepemilikan Persediaan	Ya	Ya	Tidak
Risiko Persediaan	Ya	Minimal	Tidak
Risiko Piutang	Ya	Minimal	Tidak
Risiko Pasar	Ya	Minimal	Tidak

Sumber: Dokumen *Transfer Pricing* PT X tahun 2012

Berdasarkan analisis fungsi, aset, dan risiko yang dilakukan, PT X telah menjalankan sendiri fungsi pengadaan, produksi, *quality control*, manajemen perusahaan, pengiriman, dan mengasumsikan risiko yang relevan sesuai dengan analisis fungsi. PT X dapat digolongkan sebagai perusahaan dengan fungsi dan risiko penuh (*fully fledge manufacturing*) tanpa kepemilikan aset tidak berwujud dan tidak melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (RnD).

c. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Pada tahun 2012, PT X melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam bentuk penjualan barang, pembelian bahan baku, sewa bangunan, dan pembayaran bunga pinjaman. Tabel 4.5

menjelaskan transaksi yang dilakukan PT X dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa pada tahun 2012:

Tabel 4.5 Transaksi PT X dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Jenis Transaksi PT X	Lawan Transaksi	Jumlah (Rupiah)
Pembelian Bahan Baku	PT BB	26.472.515.408
	<i>X Corporation</i>	368.136.266
Penjualan Produk	<i>AA Corporation</i>	38.873.552.516
	<i>X Corporation</i>	17.563.832.022
Sewa Bangunan	PT BB	2.327.929.461
Bunga Pinjaman	<i>X Corporation</i>	35.715.840
Sampel dan Biaya Kirim	<i>X Corporation</i>	75.561.266

Sumber: Dokumen *Transfer Pricing* PT X tahun 2012

Jumlah bunga pinjaman yang dibayarkan oleh PT X kepada *X Corporation* sebesar Rp35.715.840,00 (tidak melebihi 10 milyar) Jumlah tersebut tidak signifikan terhadap total nilai bisnis yang dilakukan oleh PT X namun harus tetap ditentukan nilai wajar dari bunga pinjaman tersebut karena jumlah total transaksi yang dilakukan PT X dengan *X Corporation* lebih dari Rp10 Milyar.

PT X memperoleh fasilitas pinjaman dari *X Corporation* dengan perjanjian pinjaman. Bentuk pinjaman yang diberikan *X Corporation* kepada PT X berbentuk modal kerja, dari pinjaman tersebut terdapat beban bunga yang harus dibayar oleh PT X kepada perusahaan induk sebagai

pemberi pinjaman. PT X harus membayar tingkat bunga 3 bulan LIBOR + 0,6%. Tabel 4.6 akan menyajikan tingkat bunga 3 bulan LIBOR tahun 2012:

Tabel 4.6 Tingkat Bunga 3 Bulan LIBOR tahun 2012

2012	3 bulan LIBOR
Desember	0,47 %

Sumber: Dokumen *Transfer Pricing* PT X tahun 2012

Perjanjian pinjaman PT X dan X *Corporation* dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Bentuk Perjanjian Pinjaman PT X dengan X *Corporation*

Tanggal Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Tanggal pelunasan	Bunga pinjaman
31 Januari, 2012	USD1.000.000	April 2012	LIBOR+0,6%=1,07%

Sumber: Dokumen *transfer pricing* PT X tahun 2012

Jumlah bunga pinjaman yang dibayarkan PT X kepada X *Corporation* pada tahun 2012 sebesar Rp35.715.840,00. Besarnya bunga pinjaman tersebut diperoleh dari jumlah pokok pinjaman PT X yaitu USD1.000.000 dikalikan dengan besarnya bunga pinjaman yang telah disepakati kedua pihak sebesar 1,07% dalam tempo 3 bulan (Februari, Maret, dan April) dan dipotong PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yaitu 10% (sesuai dengan P3B dengan Jepang), dengan nilai kurs Rp9.191,00/USD.

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada staf divisi perpajakan PT X yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen *transfer pricing* tahun 2012.

“Bunga pinjaman PT X kurang dari Rp10 Miliar tapi jumlah transaksi keseluruhan lebih dari Rp10 Miliar, jadi tetap kita uji. Kita ambil dulu pembandingnya sama apa, kalau bunga pinjaman banyak pembanding dari bank lain (data eksternal). Pembandingnya diambil dari transaksi yang sama dari bank lain, fiturnya banyak ada LIBOR, JIBOR”

PT X melakukan penentuan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman karena nilai transaksi keseluruhan dengan *X Corporation* lebih dari Rp10 Miliar. PT X menggunakan data eksternal sebagai pembanding pada penentuan harga wajar transaksi bunga pinjaman dari *X Corporation*.

2. Memilih Metode Penentuan Harga Transfer

Sifat kewajaran dan kelaziman atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh PT X untuk *X Corporation* dianalisis dengan metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP). Metode ini dipilih PT X sebagai metode yang paling tepat untuk mengevaluasi pembayaran bunga pinjaman kepada *X Corporation* karena adanya data pembanding independen yang dianggap sebanding untuk menentukan kewajaran transaksi bunga pinjaman PT X.

Penerapan metode CUP menggunakan suku bunga pinjaman bunga pasar dari Bank Indonesia (BI) dalam jangka waktu sebagai data pembanding independen untuk pembayaran bunga dari PT X kepada *X Corporation*. Data yang digunakan untuk menerapkan metode lain kurang dapat diandalkan apabila dibandingkan dengan data yang digunakan untuk menerapkan metode CUP, juga tidak ada masalah atau keadaan yang dapat merusak keandalan metode CUP.

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada staf divisi perpajakan PT X yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen *transfer pricing* tahun 2012.

“Kita pakai metode CUP, karena transaksi ini (bunga pinjaman) memang bisa dibandingkan secara *comparable* dengan yang lain, bisa dibandingkan dengan bank lain ya sudah pakai metode CUP. Biasanya *loan* pakai metode CUP karena pasti bisa dibandingkan dengan yang lain.”

PT X memilih metode CUP karena menganggap bahwa suku bunga yang dibayar kepada X *Corporation* dapat dibandingkan dengan suku bunga pinjaman dari pihak independen yang dianggap sebanding dan layak untuk dijadikan pembanding dalam penentuan harga wajar.

3. Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

PT X menentukan pembanding bunga pinjaman atas utang dari X *Corporation* berdasarkan denominasi (mata uang) dari penerima pinjaman dan persyaratan pinjaman (durasi). Pinjaman PT X dalam bentuk mata uang USD, penerima berada di Indonesia dan pinjaman tersebut diberikan dalam durasi 3 bulan. PT X melakukan penentuan harga wajar atas bunga pinjaman dengan melakukan analisis tingkat bunga pasar kredit modal kerja dalam bentuk USD, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dianggap sebanding dengan tingkat bunga yang dikenakan oleh X *Corporation*.

Proses pencarian suku bunga wajar dilakukan dengan mencari rentang kuartil suku bunga melalui situs resmi dari Bank Indonesia pada periode yang

sama. Tabel 4.8 menjelaskan kisaran rentang suku bunga pasar yang dianggap sebanding:

Tabel 4.8 Rentang kuartil Kesebandingan Suku Bunga Bank Indonesia

Bank	Suku bunga pinjaman sesuai pasar tahun 2012 (%)											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
Bank Persero	4,70	4,66	4,70	4,65	4,58	4,70	4,75	4,77	4,83	4,72	4,79	4,62
Bank swasta Nasional	5,19	5,28	5,23	5,18	5,26	5,39	5,43	5,42	5,33	5,45	5,47	5,53
Bank Luar Negeri dan Bank kerjasama	2,86	2,90	2,91	2,91	2,92	2,94	2,93	2,90	2,86	2,87	2,76	2,79
Bank Umum	3,97	4,00	4,01	4,01	4,02	4,09	4,09	4,09	4,06	4,07	4,02	4,04
Rentang Kuartil Suku Bunga	Minimal			Q1			Q2		Q3		Maksimal	
	2,76			3,98			4,6		4,98		5,53	

Sumber: Dokumen *Transfer Pricing* PT X tahun 2012

Selama periode tahun 2012 tingkat bunga pasar dari USD pinjaman modal kerja menurut Bank Indonesia menunjukkan kisaran rentang suku bunga wajar dari kuartil 1 yaitu 3,98% hingga kuartil 3 sebesar 4,98%. Suku bunga yang dibayar PT X sesuai dengan yang ditulis pada dokumen *transfer pricing* PT X tahun 2012 sebesar 1,07%, suku bunga tersebut jatuh dibawah kuartil suku bunga terendah dari suku bunga pinjaman Bank Indonesia.

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada staf divisi perpajakan PT X yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen *transfer pricing* tahun 2012.

“Kita membuktikan dulu *rate* kita masuk akal atau tidak, *rate* kita masuk ya berarti tidak ada yang aneh. Tidak ada *rate* yang terlalu tinggi atau *rate* yang terlalu seperti apa, *rate* dari X Corporation kan terlalu di bawah kuartil, kalau masuk ya berarti wajar, *rate* kita berada di bawah, *rate* kita 1,7% sedangkan kuartil nya saja yang paling rendah 3,98 %.”

Berdasarkan data pembanding yaitu suku bunga Bank Indonesia (BI) besarnya suku bunga pinjaman yang dibebankan perusahaan induk kepada PT X masih berada di bawah kuartil dan juga masih dibawah suku bunga terendah suku bunga yang telah ditetapkan oleh BI.

4. Melakukan Dokumentasi atas Langkah Penentuan Harga Wajar

PT X telah melakukan dokumentasi atas langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan harga wajar atas transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dokumen tersebut berupa dokumen *transfer pricing* yang telah disusun staf divisi perpajakan dari PT X pada tahun 2012. Dokumen tersebut berisi langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan analisis kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan data pembanding internal dan/atau data eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen.

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada staf divisi perpajakan PT X yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen *transfer pricing* tahun 2012

“Kendalanya penyusunan dokumen *transfer pricing* pada penentuan bunga wajar adalah penggunaan metode TNMM. Kalau metode TNMM bisa, maka komponen biaya dan penghasilan yang ada harus sudah wajar. Komponen biaya dan penghasilan saja masih ditentukan kewajarannya, lalu bagaimana bisa menggunakan metode TNMM?”

PT X menganggap terdapat kendala dalam melakukan dokumentasi penentuan harga wajar bunga pinjaman yaitu PT X tidak dapat menggunakan metode TNMM karena komponen biaya dan penghasilan PT X juga masih dilakukan penentuan harga wajarnya.

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, peneliti melakukan analisis data yang telah didapatkan. Data penentuan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman yang dibayar oleh PT X kepada X *Corporation* akan dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan untuk menggambarkan bagaimana PT X menentukan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman dari X *Corporation* dan kesesuaian penentuan harga wajar tersebut dengan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing*. Adapun analisis dan pembahasan data yang ditemukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penentuan Harga Wajar Transaksi Bunga Pinjaman

Pada analisis ini, peneliti akan menggambarkan bagaimana PT X menentukan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman yang diberikan oleh X *Corporation* sebagai perusahaan induk. Analisis ini diolah berdasarkan hasil yang telah diuraikan pada penyajian data penentuan harga wajar bunga pinjaman yang dilakukan oleh PT X.

a. Analisis Kesebandingan dan Menentukan Pembanding

PT X melakukan analisis kesebandingan dengan mengambil data eksternal sebagai pembanding suku bunga pinjaman yang dibayar kepada X

Corporation pada periode 2012. Berdasarkan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing* disebutkan bahwa dalam melakukan analisis kesebandingan dan mencari pembanding harus memperhatikan apabila terdapat perbedaan kondisi, dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut. Apabila tersedia data pembanding internal dan data pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka wajib pajak wajib menggunakan data pembanding internal untuk penentuan harga wajar atau laba wajar.

Hasil analisis kesebandingan menyebutkan bahwa PT X memang tidak menemukan transaksi internal yang sebanding untuk digunakan sebagai pembanding dalam melakukan penentuan harga wajar transaksi bunga pinjaman dari X *Corporation*. Penentuan harga wajar bunga pinjaman dilakukan dengan menggunakan data eksternal sebagai pembanding.

b. Pemilihan Metode Penentuan Harga Transfer

PT X melakukan pemilihan metode penentuan harga transfer menggunakan metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP), dengan alasan bahwa metode ini merupakan metode yang paling tepat untuk mengevaluasi pembayaran bunga pinjaman dari X *Corporation* karena adanya data pembanding dari pihak independen yang dianggap sebanding untuk menentukan kewajaran transaksi bunga dari X *Corporation*. Berdasarkan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing* disebutkan bahwa dalam melakukan pemilihan metode penentuan harga dilakukan kajian untuk menentukan metode penentuan harga transfer yang paling

sesuai (*The Most Appropriate Method*). Penggunaan metode CUP bisa diterapkan dengan membandingkan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak independen, dengan catatan kondisi barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dan sebanding.

Pemilihan metode CUP berarti tidak menggunakan metode penentuan harga transfer yang lain. Berikut evaluasi metode lain yang tidak digunakan oleh PT X dalam penentuan harga wajar bunga pinjaman:

1) Metode *Resale Price* (RP)

Metode RP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga transaksi suatu produk yang dilakukan dengan *X Corporation* dari harga jual kembali suatu produk setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak independen. Metode ini dapat diterapkan apabila terdapat tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara yang dilakukan dengan *X Corporation* dengan transaksi dengan pihak independen, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi. Metode RP tidak dapat diterapkan untuk mengevaluasi transaksi bunga pinjaman PT X karena transaksi ini bukan berbentuk sebuah produk.

2) Metode *Cost Plus* (CP)

Metode CP menggunakan perbandingan tidak langsung yaitu dengan membandingkan harga suatu transaksi dengan menambahkan

tingkat laba kotor yang diperoleh dari transaksi dengan pihak independen. Metode CP tidak bisa diterapkan pada transaksi bunga pinjaman PT X, karena bunga pinjaman merupakan nilai yang sudah tetap dan telah disepakati dengan *X Corporation*. Pemilihan metode CP bisa diterapkan PT X kepada *X Corporation* atas transaksi penjualan barang yang belum jadi dan akan diproses kembali untuk mendapatkan nilai tambah.

3) Metode *Profit Split* (PS)

Metode PS bisa digunakan apabila PT X dan *X Corporation* melakukan transaksi yang berhubungan dengan aset tidak berwujud atau ketika ada pembagian sistematis risiko. Pada kasus ini *X Corporation* memberikan sebuah pinjaman kepada PT X dan terdapat bunga, sehingga metode PS tidak bisa memberikan pendekatan yang lebih akurat untuk menentukan harga wajar atas bunga pinjaman. Selain itu, analisis metode PS memerlukan data pembagian laba atau laba gabungan dari setiap transaksi yang lebih rinci untuk kedua belah pihak.

4) Metode *Transactional Net Margin* (TNMM)

Metode TNMM sebenarnya dapat diterapkan pada transaksi bunga pinjaman apabila data yang dibutuhkan dan yang dapat diandalkan untuk penerapan metode ini sudah tersedia, namun untuk transaksi bunga pinjaman PT X tidak terlalu kompleks. Metode TNMM dilakukan untuk penentuan harga wajar dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi tidak sekedar perbandingan antara transaksi dengan

pihak afiliasi dengan pihak independen. Perbandingan laba operasional PT X dengan laba operasional pihak independen akan memerlukan banyak faktor selain pembayaran bunga yang dibayarkan kepada X *Corporation* untuk menentukan nilai wajarnya.

PT X melakukan Pemilihan metode penentuan harga transfer dengan memilih metode CUP karena menganggap bahwa suku bunga yang dibayar kepada X *Corporation* dapat dibandingkan dengan suku bunga pinjaman dari pihak independen yang dianggap sebanding dan layak untuk dijadikan pembanding dalam penentuan harga wajar.

c. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman

PT X menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman dengan menggunakan suku bunga Bank Indonesia (BI) sebagai pembanding atas penentuan harga wajar transaksi bunga pinjaman yang diberikan oleh X *Corporation*. Berdasarkan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing* disebutkan bahwa harga wajar metode penentuan harga transfer dapat ditentukan dalam bentuk harga tunggal (*single price*) atau dalam bentuk rentang harga wajar. Rentang harga wajar merupakan rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi syarat bahwa transaksi atau data pembanding.





Suku bunga yang diberikan X *Corporation* sebesar 1,07% sedangkan suku bunga Bank Indonesia (BI) pada periode yang sama di tingkat paling rendah adalah 0.27% dengan rentang kuartil 1 yaitu 3,98% hingga kuartil 3 sebesar 4,98%, pencarian kuartil dapat dilakukan dengan

menentukan nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar seperti pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Suku Bunga BI Tahun 2012 Setelah Diurutkan

2,76	2,79	2,86	2,87	2,90	2,90	2,91	2,91	2,92	2,93	2,94	3,97
4,00	4,01	4,01	4,02	4,02	4,04	4,06	4,07	4,09	4,09	4,09	4,58
4,62	4,62	4,65	4,66	4,70	4,70	4,70	4,72	4,75	4,77	4,79	4,83
5,13	5,19	5,23	5,26	5,28	5,33	5,39	5,42	5,43	5,45	5,47	5,53

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2016

Keterangan		= Suku Bunga Minimal dan Maksimal
		= Suku Bunga Kuartil 1
		= Suku Bunga Kuartil 2
		= Suku Bunga Kuartil 3

$$\text{Kuartil 1} = 3,97 + 4,00/2 = 3,98$$

$$\text{Kuartil 2} = 4,58 + 4,62/2 = 4,6$$

$$\text{Kuartil 3} = 4,83 + 5,13/2 = 4,98.$$

Penentuan kuartil 1,2, dan 3 mendapatkan hasil yang sesuai dengan kuartil yang ditampilkan pada dokumen *transfer pricing* PT X.

Perhitungan bunga pinjaman pada dokumen *transfer pricing* PT X sebesar Rp35.715.840,00. Peneliti menemukan ketidaksesuaian dalam proses penelitian, setelah dilakukan perhitungan pada jumlah pokok pinjaman yaitu sebesar USD1.000.000 dikali dengan bunga yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu 1,07% hasilnya berbeda, Tabel 4.10 berikut akan menjelaskan rincian perhitungan perbedaan jumlah pokok utang dan suku pinjaman yang disajikan pada dokumen *transfer pricing* PT X dengan transaksi yang sebenarnya:

Tabel 4.10 Rincian Perbedaan Perhitungan Bunga Pinjaman

Bunga Pinjaman	Menurut Dokumen <i>Transfer Pricing</i> PT X	Menurut Data Transaksi
Pokok Pinjaman	USD1.000.000	USD1.450.000
Suku Bunga	1,07%	1,181%
Tempo Pelunasan	3 bulan (92/365)	3 bulan (92/365)
Kurs	Rp9.191,00/ 1USD	Rp9.191,00
PPh 26	10% (P3B dengan Jepang)	10%
Jumlah Bunga dibayar	Rp22.309.201,09	Rp35.715839,86

Sumber: Data diolah Peneliti, 2016

Terdapat ketidaksesuaian antara nilai pokok pinjaman dan suku bunga pinjaman yang dibayar PT X kepada *X Corporation* dengan nilai yang dicantumkan pada dokumen *transfer pricing* PT X. Pokok pinjaman yang tertera pada dokumen *transfer pricing* adalah USD1.000.000 sedangkan yang didapatkan dalam penelitian adalah USD1.450.000, begitu juga suku bunga yang tertera pada dokumen *transfer pricing* PT X adalah sebesar 1,07% sedangkan suku bunga yang sebenarnya adalah 1,181% (LIBOR 3 bulan + 0,6%), meskipun suku bunga tersebut lebih besar daripada suku bunga pada dokumen *transfer pricing* PT X yaitu sebesar 1,07%, suku bunga yang sebenarnya masih dibawah kuartil 1 suku bunga BI yaitu sebesar 3,98%. Kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir dengan melakukan koordinasi antara pihak penyusun dokumen *transfer pricing* dengan bagian penerima bukti transaksi bunga pinjaman.

Berdasarkan data pembanding yaitu suku bunga Bank Indonesia (BI), suku bunga pinjaman yang dibebankan oleh *X Corporation* kepada PT X berada di bawah rentang suku bunga yang telah ditetapkan oleh BI, dapat ditetapkan bahwa suku bunga dari *X Corporation* tersebut masih termasuk dalam suku bunga wajar apabila dilihat dari pihak PT X, *X Corporation* dapat melakukan evaluasi atas suku bunga tersebut apabila diperlukan karena suku bunga pinjaman terlalu rendah dibawah kuartil.

d. Dokumentasi Langkah-langkah Penentuan Harga Wajar

PT X melakukan dokumentasi dengan sangat baik dan lengkap. Berdasarkan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing* disebutkan bahwa dokumentasi yang dilakukan harus mencakup langkah-langkah dan kajian dalam melakukan analisis kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan data pembanding internal dan/atau data pembanding eksternal serta menyimpan dasar catatan atau dokumen sesuai ketentuan berlaku, semua langkah-langkah tersebut telah dilakukan PT X.

2. Analisis kesesuaian dengan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing*

Pada analisis ini akan dijelaskan secara singkat tentang kesesuaian penentuan harga wajar transaksi bunga pinjaman PT X dari *X Corporation* dengan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing* yang telah mengatur langkah-langkah untuk penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Tabel 4.11 akan menjelaskan kesesuaian penentuan harga wajar tersebut:

Tabel 4.11 Kesesuaian dengan ketentuan perpajakan tentang transfer pricing

No.	Ketentuan Perpajakan tentang Transfer Pricing	Penentuan Harga Wajar Bunga Pinjaman PT X	Keterangan	
			Sesuai	Tdk Sesuai
1.	Analisis Kesebandingan dan Menentukan Pembanding			
a.	Mata rantai (<i>Supplay chain management</i>), dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah: <ul style="list-style-type: none">- Memetakan rantai suplai perusahaan grup- Membedakan fungsi-fungsi utama perusahaan grup.	Pada tahun 2012 tercatat bahwa PT X melakukan kegiatan usaha degan menerima sebagian pesanan produk dari pihak yang meiliki hubungan istimewa yaitu X <i>Corporation</i> dan AA <i>Corporation</i> , PT X melakukan pembelian bahan baku ke PT BB untuk diproses. Produk yang selesai di produksi, dikirim sesuai pesanan pembeli yaitu X <i>Corporation</i> atau AA <i>Corporation</i> .	✓	

b.	<p>Analisis Fungsi, Aset, dan Resiko (FAR), dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fungsi – fungsi utama yang dijalankan oleh perusahaan - Jenis aktiva yang digunakan dan yang akan digunakan - Resiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing- masing pihak yang melakukan transaksi. 	<p>PT X melakukan analisis dengan hasil sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semua fungsi dijalankan oleh PT X kecuali fungsi pemasaran dan R&D (penelitian & Pengembangan) yang dilakukan oleh perusahaan induk yaitu <i>X Corporation</i>. - aktiva berwujud dimiliki sendiri oleh PT X dan aktiva yang tidak berwujud dimiliki oleh <i>X Corporation</i>. - PT X memiliki risiko yang tinggi, kecuali risiko utang dan piutang tak tertagih yang memiliki tingkat risiko yang sedang. 	✓	
----	--	---	---	--

c.	Mentukan karakteristik utama perusahaan seperti jasa maklon (<i>toll manufacturing</i>), manufaktur dengan fungsi dan risiko terbatas (<i>contract manufacturing</i>), dan manufaktur dengan fungsi dan risiko penuh (<i>fully fledge manufacturing</i>);	Sesuai dengan analisis yang dilakukan terhadap fungsi, aset, dan risiko, PT X termasuk perusahaan dengan fungsi dan risiko yang tinggi (<i>fully fledge manufacturing</i>) karena melakukan sendiri pengadaan barang, memproses, menjual dan mendistribusikan barang jadi.	✓	
d.	Transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa minimal 10 Milyar dalam satu tahun untuk setiap pihak dan bisa digolongkan untuk setiap jenis transaksi.	Pada tahun 2012 PT X melakukan transaksi dengan X <i>Corporation</i> lebih dari 10 Milyar untuk setiap pihak, dengan rincian transaksi bunga pinjaman sebesar Rp35.715.840 yang dibayarkan kepada X <i>Corporation</i> . Meskipun nilai bunga pinjaman kurang dari Rp10 Milyar, namun PT X tetap melakukan	✓	

		penentuan harga wajar terhadap bunga pinjaman tersebut karena total transaksi dengan <i>X Corporation</i> lebih dari Rp10 Milyar dalam satu tahun.		
2.	Menentukan Metode Penentuan Harga Transfer			
	<p>Pemilihan metode penentuan harga transfer, hal yang harus diperhatikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelebihan dan kekurangan setiap metode - Kesesuaian pemilihan metode <i>transfer pricing</i> dengan analisis fungsional - Ketersediaan informasi yang andal - Tingkat kesebandingan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak independen. 	<p>Pada transaksi bunga pinjaman dari perusahaan induk, PT X memilih metode CUP dalam penentuan harga wajar atas bunga pinjaman tersebut dengan alasan melalui metode CUP, suku bunga yang dibayar oleh PT X kepada <i>X Corporation</i> bisa dibandingkan dengan suku bunga wajar dari pihak independen.</p>	✓	

3.	Penerapan Kewajaran dan Kelaziman Usaha			
	Hasil kewajaran dan kelaziman pembayaran bunga pinjaman, Menampilkan hasil kewajaran dan kelaziman perbandingan yang telah dilakukan dengan pembanding.	PT X memilih suku bunga yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) pada periode yang sama, bunga pinjaman yang dibayar PT X sebesar 1,07% dari pokok pinjaman, berada di bawah batas minimal kuartil suku bunga Bank Indonesia yaitu sebesar 2,76%	✓	
4.	Dokumentasi Langkah Penentuan Harga Wajar			
	Mendokumentasikan langkah-langkah dan hasil kajian dalam melakukan analisis kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan data pembanding internal dan/atau eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	PT X melakukan dokumentasi langkah-langkah penentuan harga wajar transaksi bunga pinjaman pada dokumen <i>transfer pricing</i> dengan baik.	✓	

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2016

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, Peneliti mendapatkan kesesuaian penentuan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman yang dilakukan oleh PT X dengan penentuan harga wajar yang disebutkan pada ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing*. Langkah-langkah penentuan harga wajar tersebut adalah:

- a. Analisis kesebandingan dan menentukan pembanding, PT X menggunakan data eksternal sebagai pembanding bunga pinjaman dari X *Corporation*.
- b. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat, PT X Memilih Metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) sebagai penentu harga transfer.
- c. Penerapan kewajaran dan kelaziman usaha telah sesuai, PT X menggunakan Suku Bunga pinjaman Bank Indonesia pada peridode yang sama sebagai pembanding dengan mencari rentang kuartil untuk menentukan suku bunga wajar.
- d. Dokumentasi langkah penentuan harga wajar bunga pinjaman, PT X melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap melalui dokumen *transfer pricing* tahun 2012.

Dapat disimpulkan bahwa penentuan harga wajar bunga pinjaman yang dilakukan oleh PT X atas transaksi bunga pinjaman dari X *Corporation* sebagai perusahaan induk telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagai ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. PT X melakukan transaksi dengan X *Corporation* sebagai perusahaan induk yang berada di Jepang secara keseluruhan lebih dari Rp10 milyar dalam setahun, jumlah tersebut termasuk transaksi bunga pinjaman, sehingga harus ditentukan nilai wajar dari setiap transaksi melalui penyusunan dokumen *transfer pricing*. PT X menggunakan metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) sebagai penentu harga wajar bunga pinjaman dari X *Corporation*, dengan alasan bahwa PT X menemukan dan menggunakan data dari pihak independen yaitu *rate* Bank Indonesia yang dianggap sebanding sebagai pembanding transaksi bunga pinjaman dari X *Corporation*. PT X menggunakan data eksternal sesuai dengan analisis kesebandingan dan mencari pembanding dalam dokumen *transfer pricing* yang telah disusun untuk menentukan harga wajar atas bunga pinjaman yang di bayarkan kepada perusahaan induk.
2. PT X menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman menggunakan suku bunga bank Indonesia (BI) sebagai pembanding dengan bunga yang diberikan X *Corporation*. Suku bunga yang dicantumkan pada dokumen *transfer pricing* sebesar 1,07% setelah dilakukan penelitian, suku bunga yang sebenarnya adalah sebesar 1,181% sesuai bukti transaksi PT X dengan X *Corporation*, sehingga terjadi kesalahan dalam penyebutan bunga

pinjaman yang diberikan. Suku bunga Bank Indonesia (BI) yang digunakan sebagai pembanding pada periode yang sama di tingkat paling rendah adalah 0.27%, sehingga meskipun suku bunga yang diberikan *X Corporation* adalah 1,181% namun masih bisa dikatakan masuk dalam kategori wajar.

3. Penentuan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman dari perusahaan induk yang dilakukan oleh PT X mulai dari analisis kesebandingan dan menentukan pembanding, memilih metode transfer, menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman, hingga dokumentasi langkah-langkah penentuan harga wajar bunga pinjaman seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing*.

B. SARAN

1. Pemilihan metode yang digunakan PT X untuk menentukan harga wajar atas bunga pinjaman yang diberikan *X Corporation* bisa menggunakan metode TNMM apabila data pembanding tidak ditemukan, metode TNMM akan lebih akurat apabila laba bersih operasi terhadap biaya terhadap penjualan antara PT X dan *X Corporation* dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak independen.
2. Dokumentasi yang dilakukan oleh staf divisi perpajakan PT X seharusnya mengacu pada data transaksi yang telah dilakukan, agar menghindari adanya kesalahan yang berujung pada nilai wajar dalam penentuan harga wajar apabila dilakukan pemeriksaan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

3. *X Corporation* dapat melakukan evaluasi atas suku bunga yang diberikan kepada PT X agar suku bunga masih tetap masuk rentang bunga sesuai pasar dan masuk dalam kategori wajar bagi kedua pihak apabila diperlukan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan *X Corporation* di negaranya.
4. Pemerintah dalam hal ini DJP, diharapkan dapat lebih perhatian terhadap perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, khususnya perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), agar transaksi yang dilakukan memang benar kewajarannya.
5. Bagi peneliti selanjutnya apabila ingin melakukan penelitian tentang topik yang sama dapat menggunakan data dari sisi DJP tentang penentuan harga wajar yang benar atas transaksi bunga pinjaman dari perusahaan induk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir. 2004. *Korespondensi Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: PPM.
- Arikunto. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, 2007. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*, Jakarta : Kencana.
- Djajasudarma, Hj. T. Fatimah. 2006. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Darussalam dan Danny Septriadi. 2007. *Advance Pricing Agreement sebagai suatu alternatif Pemecahan Sengketa Transfer Pricing*. Majalah Inside Tax Edisi 01. Jakarta, Darussalam Tax Center.
- Echols, John M and Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herprasetyo Budi. 2012. *Sukses ubah kartu kredit jadi modal usaha!*. Tulungagung: Adora Media.
- Khalwaty Tajul. 2000. *Inflasi dan Solusinya, cetakan pertama*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Laksmono, R. Didy. 2001. *Suku Bunga Sebagai Salah Satu Indikator Ekspektasi Inflasi*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Narimawati Umi. 2008. *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, teori dan aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Nawawi, H. Hadari & H. Mimi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Panjaitan Hulaman dan Anner Sianipar. 2008. *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta: CV. Indhill Co.
- Puspoprano, Sawaldjo. 2004, *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan*,

Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Salim dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi di Indonesia*. Ed. 1-3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Scanella Enzo dan Dario Bennardo. 2013. *Business System Review "Interest Rate Risk in Banking: a Theoretical and Empirical Investigation through a Systemic Approach (Asset & Liability Management)"*. Palermo: Viale delle Scienze.

Siamat Dahlan, 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi kesatu

Sihombing Jonker, 2008. *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, Bandung: Penerbit PT. Alumni.

Suandy Erly. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi, Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, BPFE, Yogyakarta.

Umar Husein. 2003. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

Clarissa G S. 2004. *Analisis Praktik Transfer Pricing Atas Produk Digital Pada PT KLM* Skripsi pada ilmu administrasi fiskal Universitas Indonesia. Depok

Medianti Jipi Saraswati. 2014 *Evaluasi Kewajaran Harga Dan Kesesuaian Metode Transfer Pricing Dengan Perdirjen Pajak Per-32/Pj/2011(Studi Di Pt Martex Indonesia)* Skripsi pada Program studi perpajakan universitas Brawijaya. Malang

Undang-Undang dan Peraturan

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1993 tentang *Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Memiliki Hubungan Istimewa*

Peraturan Direktur jendral pajak Nomor PER: 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER 32/PJ/ 2011 tentang *prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa*.

Pernyataan Standart Akuntanasi Keuangan Ed. PSAK 68 tentang *Pengukuran nilai wajar*

Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 50/PJ/2013 tentang *Petunjuk teknis pemeriksaan terhadap wajaib pajak yang mempunyai hubungan istimewa*

Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 18/PJ/53/1995 tentang *pengertian hubungan istimewa (seri ppn 16-95)*

Undang -undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang *ketentuan umum dan tata cara perpajakan*.

Undang – undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang undang Nomor 36 tahun 2008 tentang *pajak penghasilan*.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang *penanaman modal*

Internet

Baskoro Arya(2014) Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia Dengan Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN Tersedia di <http://mea.co.id/deteksi-mea-peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-masyarakat-indonesia/> di akses pada 20 oktober 2015

Harian ekonomi Neraca (2013,5 Februari) Industri manufaktur menjadi incaran investor asing [online] Tersedia di <http://www.kemenperin.go.id/artikel/4073/Industri-Manufaktur-Jadi-Incaran-Investor-Asing> di akses pada 12 oktober 2015

Helen Destyanda. (2015, 06 oktober). Maybank Indonesia Kaji Pinjaman dari Induk.Finansia. bisnis [online] Tersedia di

<http://finansial.bisnis.com/read/20151006/90/479621/maybank-indonesia-kaji-pinjaman-dari-induk> di akses pada 16 oktober 2015

Pusat Program Transformasi Bank Indonesia (2015, 26 Maret) Tentang JIBOR[online] Tersedia di
<http://www.bi.go.id/id/moneter/jibor/tentang/Contents/Default.aspx> di akses pada 25 maret 2016

Klinik hukum online.(2014, 22 september). Cara mendapatkan dana dari luar negeri.hukum online [online] Tersedia di
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5327fd095c592/dua-cara-mendapatkan-dana-dari-luar-negeri> di akses pada 17 oktober 2015

Ladya Rissa.(2013, 21 oktober). Neraca Perdagangan Indonesia Defisit.Kompasiana [online] Tersedia di
<http://www.kompasiana.com/rissasha/neraca-perdagangan-indonesia-defisit552b85f56ea8346b058b456b> di akses pada 17 oktober 2015

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 1503 /UN10.3/PG/2016

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : PT.

3 Jawa Timur

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Khustanul Arif

Alamat : Jl. Pisang Kipas No. 54 Kota Malang.

NIM : 125030400111027

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Tema : Analisis Penentuan Harga Wajar Atas Transaksi Bunga Pinjaman PT X dari Perusahaan Induk.

Lamanya : 2 (dua) minggu.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 29 Januari 2016

a.n. Dekan

Kepada Program Studi Perpajakan



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si

NIP. 19600515 198601 1 002

1/2 '16

DANY. S

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER - 32/PJ/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN
DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA
WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan kelancaran dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dipandang perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Hubungan Istimewa adalah hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's length principle/ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding.

Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.

Penentuan Harga Transfer (transfer pricing) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri diluar Indonesia.

(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;

perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau

transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

(2) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;

menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;

menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan

mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(3) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle/ALP) didasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar (Fair Market Value/FMV).

(4) Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan nilai seluruh transaksi tidak melebihi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak untuk setiap lawan transaksi, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal :

1) tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau

2) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba;

b. dalam hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan Data Pembanding Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar.

c. dalam hal Data Pembandingan Internal yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat insidental, maka Data Pembandingan Internal dimaksud hanya dapat dipergunakan dalam transaksi yang bersifat insidental antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan Analisis Kesebandingan dan penentuan pembandingan, penggunaan Data Pembandingan Internal dan/atau Data Pembandingan Eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Data Pembandingan Internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Data Pembandingan Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

(3) Data Pembandingan Internal dan Data Pembandingan Eksternal harus memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan.

(4) Dalam hal Data Pembandingan Internal telah memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan, maka Data Pembandingan Eksternal tidak diperlukan.

(5) Data Pembandingan Eksternal dapat diperoleh dari database komersial maupun database lainnya.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap signifikan dalam hal kegiatan tersebut berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan/atau laba yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan.

(3) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi, harus dipertimbangkan antara lain:

struktur organisasi dan posisi perusahaan yang diuji dalam kelompok usaha serta manajemen mata rantai (supply chain management) kelompok usaha;

fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti desain, pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen serta karakteristik utama perusahaan seperti jasa maklon (toll manufacturing), manufaktur dengan fungsi dan risiko terbatas (contract manufacturing), dan manufaktur dengan fungsi dan risiko penuh (fully fledge manufacturing);

jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan Harta Tidak Berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi;

risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam melakukan penilaian dan analisis atas ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, harus dilakukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis.

(2) Dalam hal tidak terdapat dokumen tertulis, hubungan kontrak para pihak dapat ditentukan dari peran/perilaku para pihak atau prinsip ekonomi, yang umumnya mengatur hubungan para pihak tersebut.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Analisis keadaan ekonomi diperlukan untuk memperoleh tingkat kesebandingan dalam pasar tempat beroperasinya para pihak yang melakukan transaksi.

(2) Keadaan ekonomi yang harus diidentifikasi untuk menentukan tingkat kesebandingan pasar mencakup:

Lokasi geografis;

ukuran pasar;

tingkat persaingan dalam pasar serta posisi persaingan antara penjual dan pembeli;

ketersediaan barang atau jasa pengganti;

tingkat permintaan dan penawaran dalam pasar baik secara keseluruhan maupun regional;

daya beli konsumen;

sifat dan cakupan peraturan pemerintah dalam pasar;

biaya produksi termasuk biaya tanah, upah tenaga kerja, dan modal; biaya transportasi; dan tingkatan pasar;

tanggal dan waktu transaksi; dan sebagainya.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dalam penentuan metode Harga Wajar atau Laba Wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (The Most Appropriate Method).

(2) Metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diterapkan adalah :

Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP);

Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM);

Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method);

Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM); atau

Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM).

(3) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

(4) Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

(5) Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

(6) Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM) adalah metode Penentuan Harga Transfer berbasis Laba Transaksional (Transactional Profit Method Based) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan

dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (Contribution Profit Split Method) atau Metode Sisa Pembagian Laba (Residual Profit Split Method).

(7) Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin method/TNMM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.

(8) Dalam menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

kelebihan dan kekurangan setiap metode;

kesesuaian metode Penentuan Harga Transfer dengan sifat dasar transaksi antar pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, yang ditentukan berdasarkan analisis fungsional;

ketersediaan informasi yang handal (sehubungan dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa) untuk menerapkan metode yang dipilih dan/atau metode lain;

tingkat kesebandingan antara transaksi antar pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, termasuk kehandalan penyesuaian yang dilakukan untuk menghilangkan pengaruh yang material dari perbedaan yang ada.

(9) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Perbandingan Harga antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) antara lain adalah:

barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau

kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa Identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

(10) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM) antara lain adalah:

tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan

pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.

(11) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method) antara lain adalah:

barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;

terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau

bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.

(12) Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM) secara khusus hanya dapat diterapkan dalam kondisi sebagai berikut:

transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah; atau

terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat.

(13) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM) antara lain adalah:

salah satu pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan kontribusi yang khusus; atau

salah satu pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain.

(14) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan kajian yang dilakukan dan menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Pasal 12 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:

penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;

nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;

(3) Penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud.

(4) Dalam menentukan nilai transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diterapkan melalui Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

(5) Transaksi jasa antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal transaksi jasa terjadi hanya karena terdapat kepemilikan perusahaan induk pada salah satu atau beberapa perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha.

(6) Transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk biaya atau pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan:

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk, seperti rapat pemegang saham perusahaan induk, penerbitan saham oleh perusahaan induk, dan biaya pengurus perusahaan induk;

kewajiban pelaporan perusahaan induk, termasuk laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk, kecuali terdapat bukti mengenai adanya manfaat yang terukur yang dinikmati oleh Wajib Pajak;

perolehan dana/modal yang dipergunakan untuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan dalam kelompok usaha, kecuali pengambilalihan tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak dan manfaatnya dinikmati oleh Wajib Pajak.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi pemanfaatan dan pengalihan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Harta Tak Berwujud (Intangibles) adalah suatu aktiva yang pada umumnya memiliki masa manfaat yang panjang dan tidak mempunyai bentuk fisik serta memiliki kegunaan dalam kegiatan operasi perusahaan dan penggunaannya tidak untuk dijual kembali, seperti paten, hak cipta atau merek dagang.

(3) Harta Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Harta Tidak Berwujud sehubungan dengan Fungsi Perdagangan (Trade Intangibles) dan Harta Tidak Berwujud sehubungan dengan Fungsi Pemasaran (Marketing Intangibles).

(4) Harta Tidak Berwujud sehubungan dengan Fungsi Perdagangan (Trade Intangibles) pada umumnya terjadi melalui kegiatan riset dan pengembangan yang berisiko dan mahal, sehingga pemiliknya berusaha mengganti pengeluaran tersebut melalui penjualan barang, perjanjian lisensi atau kontrak jasa.

(5) Harta Tidak Berwujud sehubungan dengan Fungsi Pemasaran (Marketing Intangibles) meliputi antara lain merek dagang atau nama dagang yang membantu meningkatkan pemasaran dari barang dan jasa, daftar pelanggan, dan saluran distribusi.

(6) Merek Dagang adalah nama, simbol atau gambar yang unik yang dimiliki sebagai identitas dari suatu barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh pabrikan atau dealer, dimana penggunaannya oleh pihak lain diatur oleh hukum domestik atau hukum internasional.

(7) Transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :

transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi;

terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan

transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan Analisis Kesebandingan dan menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi.

(8) Transaksi pengalihan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :

transaksi pengalihan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi; dan

nilai pengalihan Harta Tidak Berwujud antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai pengalihan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding.

(9) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) harus dipertimbangkan antara lain :

keterbatasan geografis dalam pemanfaatan hak atas Harta Tidak Berwujud;

eksklusifitas hak yang dialihkan; dan

keberadaan hak pihak yang memperoleh Harta Tak Berwujud untuk turut serta dalam pengembangan harta dimaksud.

13. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1) Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution Arrangements) adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk berbagi risiko dari mengembangkan, menghasilkan atau mendapatkan aset, jasa atau hak, dan untuk menentukan fungsi dan peranan para pihak dalam kesepakatan atas aset, jasa atau hak dimaksud.

(2) Para pihak dalam Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution Arrangements) berhak untuk mendapatkan manfaat pelaksanaan Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution Arrangements) sebagai pemilik efektif (effective owners).

(3) Dalam hal terdapat Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution Arrangements), maka kontribusi biaya antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dibandingkan dengan kontribusi biaya dalam kesepakatan yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya.

(2) Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(3) Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumentasi dalam melaporkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari satu set dokumen induk dan satu set lampiran dari dokumen induk.

(4) Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen yang disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi.

(5) Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan oleh Wajib Pajak sekurang-kurangnya mencakup:

gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha;

kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;

hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi usaha.

pembandingan yang terpilih;

catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak serta alasan penolakan metode yang tidak dipilih.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
- (2) Kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa.
- (3) Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyesuaian (correlative adjustment) terhadap penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak sebagai tindak lanjut atas suatu penyesuaian (primary adjustment) yang dilakukan oleh :

Direktur Jenderal Pajak atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya termasuk Bentuk Usaha Tetap yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak; atau

otoritas pajak negara lain atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak negara tersebut yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak dalam negeri termasuk Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

- (2) Atas penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk melakukan sendiri penyesuaian penghitungan pajaknya.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang menyangkut penerapan ketentuan dalam P3B sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak di negara mitra P3B terhadap Wajib Pajak yang menjadi lawan transaksinya.

(2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/jurisdiksi lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

(3) Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prosedur administratif yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari Indonesia dengan pejabat yang berwenang dari negara mitra P3B untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang timbul sehubungan dengan penerapan P3B.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai upaya menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang PPh.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 November 2011

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

NIP 195411111981121001

3. Bukti Transaksi Bunga Pinjaman PT X dengan X Corporaiton

PT. [REDACTED]		BUKTI BANK KELUAR		No. : B/20T/10/12/A	
Dibayarkan kepada :				Tanggal : 25/4/12	
Interest loan .				Lampiran : Lembar	
Perkiraan	URAIAN			Jumlah	
	o Periode 31 Des '11 - 31 march '12 .				
	500.000 x 92/365 x 1,181 % =			\$ 1.488,38	
	200.000 x 92/365 x 1,181 % =			\$ 595,36	
	200.000 x 92/365 x 1,181 % =			\$ 595,36	
	550.000 x 92/365 x 1,181 % =			\$ 1.637,22	
				\$ 4.316,32	
	10 % x \$ 4.316,32			(\$ 431,63)	
				\$ 3.884,69	
				35 715.834.86	

(通貨 : US \$)

コード	貸付日	基礎金額	約定返済日	計算期間		日数	利率	利息
				自	至			
α	12/31/2011	500,000	12/28/2012	12/31/2011	3/31/2012	92	1.18100%	1,488.38
β	12/31/2011	200,000	12/28/2012	12/31/2011	3/31/2012	92	1.18100%	595.36
γ	12/31/2011	200,000	12/28/2012	12/31/2011	3/31/2012	92	1.18100%	595.36
δ	12/31/2011	550,000	12/28/2012	12/31/2011	3/31/2012	92	1.18100%	1,637.22
TOTAL		1,450,000	—	—	—	—	—	US\$4,316.32
								源泉税 10 %
								US\$431.63
								差引
								US\$3,884.69

* 365 日ベース。両端。

請求利息金額

US\$3,884.69

4. Suku Bunga LIBOR Tahun 2012

US Dollar LIBOR interest rates 2012, all maturities

Maturity / rate 2012	first	last	high	low	average
USD LIBOR - overnight	0.149 %	0.168 %	0.170 %	0.139 %	0.153 %
USD LIBOR - 1 week	0.208 %	0.193 %	0.208 %	0.177 %	0.189 %
USD LIBOR - 2 weeks	0.243 %	0.200 %	0.243 %	0.192 %	0.211 %
USD LIBOR - 1 month	0.295 %	0.209 %	0.296 %	0.207 %	0.236 %
USD LIBOR - 2 months	0.428 %	0.254 %	0.429 %	0.253 %	0.328 %
USD LIBOR - 3 months	0.582 %	0.306 %	0.582 %	0.306 %	0.430 %
USD LIBOR - 4 months	0.658 %	0.363 %	0.659 %	0.361 %	0.521 %
USD LIBOR - 5 months	0.729 %	0.435 %	0.729 %	0.433 %	0.603 %
USD LIBOR - 6 months	0.811 %	0.508 %	0.812 %	0.508 %	0.687 %
USD LIBOR - 7 months	0.864 %	0.576 %	0.865 %	0.573 %	0.747 %
USD LIBOR - 8 months	0.915 %	0.631 %	0.915 %	0.629 %	0.798 %
USD LIBOR - 9 months	0.966 %	0.686 %	0.968 %	0.686 %	0.850 %
USD LIBOR - 10 months	1.017 %	0.737 %	1.018 %	0.737 %	0.903 %
USD LIBOR - 11 months	1.071 %	0.788 %	1.072 %	0.786 %	0.956 %
USD LIBOR - 12 months	1.130 %	0.844 %	1.130 %	0.842 %	1.013 %

Sumber: www.gobal-rates.com

5. Nilai Kurs Bulan April Tahun 2012

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA MATA UANG USD Grafik Time Series			
Nilai	Kurs Jual	Kurs Beli	Tanggal
1.00	9,236.00	9,144.00	30 Apr 2012
1.00	9,236.00	9,144.00	27 Apr 2012
1.00	9,236.00	9,144.00	26 Apr 2012
1.00	9,240.00	9,148.00	25 Apr 2012
1.00	9,239.00	9,147.00	24 Apr 2012
1.00	9,230.00	9,138.00	23 Apr 2012
1.00	9,230.00	9,138.00	20 Apr 2012
1.00	9,228.00	9,136.00	19 Apr 2012
1.00	9,223.00	9,131.00	18 Apr 2012
1.00	9,224.00	9,132.00	17 Apr 2012
1.00	9,219.00	9,127.00	16 Apr 2012
1.00	9,220.00	9,128.00	13 Apr 2012
1.00	9,219.00	9,127.00	12 Apr 2012
1.00	9,216.00	9,124.00	11 Apr 2012
1.00	9,211.00	9,119.00	10 Apr 2012
1.00	9,214.00	9,122.00	9 Apr 2012
1.00	9,205.00	9,113.00	5 Apr 2012
1.00	9,204.00	9,112.00	4 Apr 2012
1.00	9,191.00	9,099.00	3 Apr 2012
1.00	9,209.00	9,117.00	2 Apr 2012

Sumber: www.bi.go.id

6. Perjanjian Penghindaran Pajak Beranda

NO	NEGARA	PAJAK PENGHASILAN		DIVIDEN		BUNGA & ROYALTI			
		TARIF BPT	PENGECUALIAN PERUSAHAAN KBH	DIVIDEN PORTFOLIO	PENYERTAAN LANGSUNG	BUNGA UMUM	ROYALTI KHUSUS	ROYALTI UMUM	ROYALTI KHUSUS
1	Aljazair	10%	Tidak ada	15%	15%	15%	-	15%	-
2	Australia	15%	Ya	15%	15%	10%	-	15%	10% ⁴⁰
3	Austria	12%	Ya	15%	10% ¹⁰	10%	-	10%	-
4	Bangladesh	10%	Ya	15%	10% ¹⁰	10%	-	10%	-
5	Belgia	15%	Tidak	15%	15%	15%	10%	10%	-
	-Renegosiasi	10%	Ya	15%	10% ¹¹	10%	-	10%	-
6	Brunei Darussalam	10%	Ya	15%	15%	15%	-	15%	-
7	Bulgaria	15%	Ya	15%	15%	10%	-	10%	-
8	Kanada	15%	Ya	15%	15%	15%	-	15%	-
	-Renegosiasi	15%	Tidak	15%	10% ¹²	10%	-	10%	-
9	Republik Ceko	12,50%	Ya	15%	10% ¹³	12,50%	-	12,50%	-
10	Cina	10%	Tidak ada	10%	10%	10%	-	10%	-
11	Denmark	15%	Ya	20%	10% ¹⁴	10%	-	15%	-
12	Mesir	15%	Ya	15%	15%	15%	-	15%	-
13	Finlandia	15%	Ya	15%	10% ¹⁵	10%	-	15%	10% ⁴¹
14	Perancis	10%	Tidak	15%	10% ¹⁶	15%	10% ⁴²	10%	-
15	Jerman	10%	Tidak	15%	10% ¹⁷	10%	-	15%	10% ⁴³
16	Hungaria	Tidak ada	Tidak ada	15%	15%	15%	-	15%	-
17	India	10%	Ya	15%	10% ¹⁸	10%	-	15%	-
18	Italia	12%	Ya	15%	10% ¹⁹	10%	-	15%	10% ⁴⁴
19	Iran	7%	Tidak ada	7%	7%	10%	-	12%	-
20	Jepang	10%	Ya	15%	10% ²⁰	10%	-	10%	-

Sumber: Kemenkeu.go.id

7. Pedoman dan Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan dengan staf perpajakan PT X sebagai informan pada hari jumat tanggal 4 maret 2016 bertempat di kantor PT X, Berikut hasilnya:

P: Bagaimanakah sejarah berdirinya PT X ?

I: Berdiri tahun 2004, pemilik saham PT X yaitu PT BB 40% dan X *Corporation* di Jepang 60%. Sejarahnya, pemilik X *Corporation* membeli bahan karpet di PT BB untuk diproduksi di Jepang, tapi semakin lama volume permintaan semakin banyak akhirnya ingin membuka perusahaan di indonesia, tenaga kerja dan proses produksi di indonesia lalu dikirim lagi ke perusahaan induk di Jepang. bahan aksesorisnya dari Jepang, karena *join* (kerja sama) maka bahan baku karpetnya dari PT BB dan setelah di produksi, produk dikirim lagi ke Jepang, lokasi PT X merupakan kawasan berikat jadi produk kita 90% untuk di ekspor dan 10% boleh penjualan di dalam negeri.

P: Apa saja kegiatan usaha PT X dan produk yang dihasilkan PT X ?

I: PT X mengambil bahan baku dari PT BB lalu di proses dan di jual ke perusahaan induk, produknya *car mats* bisa dilihat di logo perusahaan, jadi kita produksi karpet bawah mobil dan aksesoris sesuai dengan pesanan perakitan mobil seperti Nissan, Mitsubishi, dan isuzu.

P: Bagaimanakah modal saham yang terdapat pada PT X?

I: Modalnya itu 60-40 % antara X *Corporation* dan PT BB, selain itu tidak ada lagi hanya dua pihak saja pemilik modal saham PT X.

P: Bagaimanakah susunan pengurus dan struktur organisasi PT X?

I: Nanti kami berikan Softcopy nya ya.

P: Bagaimanakah performa perusahaan dilihat dari laporan keuangan PT X tahun 2012?

I: Keuangan pada waktu itu terjadi krisis, waktu itu tahun 2008 kita mau perluasan karena biasanya cuma ke Jepang, waktu itu mau perluasan ke amerika tahun 2009 mau pembelian mesin untuk ke amerika, waktu itu ada penambahan modal sesuai kepemilikan saham 60% dan 40% untuk ke amerika, lalu terjadi krisis tapi sudah diberi penambahan modal jadi ya rugi sampai tahun 2012 mulai dari 2010, 2011, dan 2012. tapi tetap dilanjutkan karena sudah terlanjur beli mesin. Soalnya kalau terjadi krisis yang terkena dampak yang paling besar kan industri otomotif .

P: Siapa sajakah pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan PT X?

I: X *Corporation*, PT BB, dan AA *Corporation* selaku pemegang saham mayoritas X *Corporation*

P: Transaksi apa yang dilakukan PT X dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa?

I: Pembelian bahan baku dan penjualan produk jadi

P: Apakah PT X melakukan dokumentasi *transfer pricing* setiap tahun?

I: Tidak, pada tahun 2011, 2012, dan 2013 saja

- P: Adakah dari transaksi pada tahun 2012 berupa pinjaman kepada perusahaan induk dan dalam bentuk apa?
- I: Ada, bentuk uang yang dibelikan mesin dan tenaga ahli untuk mengatur mesin
- P: Jika ada bagaimana ketentuan peminjaman tersebut?
- I: Dari pinjaman yang diberikan ada bunga sebesar 3 Bulan LIBOR ditambah 0,6%
- P: Berapa bunga pinjaman yang harus dibayar PT X kepada perusahaan induk atas pinjaman tersebut?
- I: Rp35.715.840
- P: Apakah bunga pinjaman tersebut harus ditentukan kembali nilai wajarnya?
- I: Bunga pinjaman PT X kurang dari Rp10 Milyar tapi jumlah transaksi keseluruhan lebih dari Rp10 Milyar, jadi tetap kita uji. Kita ambil dulu pembandingnya sama apa, kalau bunga pinjaman banyak pembanding dari bank lain (data eksternal). Pembandingnya diambil dari transaksi yang sama dari bank lain, fiturnya banyak ada LIBOR, JIBOR
- P: Metode apakah yang digunakan PT X dalam transaksi bunga pinjaman tahun 2012?
- I: Kita pakai metode CUP, karena transaksi ini (bunga pinjaman) memang bisa dibandingkan secara *comparable* dengan yang lain, bisa dibandingkan dengan bank lain ya sudah pakai metode CUP. Biasanya *loan* pakai metode CUP karena pasti bisa dibandingkan dengan yang lain.
- P: Apakah pemilihan metode yang digunakan PT X terkait transaksi *transfer pricing* pada tahun 2011 sudah sesuai dengan perdirjen pajak 32 tahun 2011?
- I: Sudah sesuai menurut kami.
- P: Bagaimana PT X menentukan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman dari perusahaan induk?
- I: Di uji dengan *rate* BI, fokusnya ke modal kerja.
- P: Bagaimanakah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi PT X terkait bunga pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa?
- I: Kita membuktikan dulu *rate* kita masuk akal atau tidak, *rate* kita masuk ya berarti tidak ada yang aneh. Tidak ada *rate* yang terlalu tinggi atau *rate* yang terlalu seperti apa, *rate* dari X Corporation kan terlalu di bawah kuartil, kalau masuk ya berarti wajar, *rate* kita berada di bawah, *rate* kita 1,7% sedangkan kuartil nya saja yang paling rendah 3,71 %.
- P: Apakah Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai metode yang di pilih sudah sesuai dengan perdirjen pajak 32 tahun 2011?
- I: Sudah sesuai menurut kami.
- P: Apakah ada kesulitan selama menyusun dokumen *transfer pricing*?
- I: Kendalanya penyusunan dokumen *transfer pricing* pada penentuan bunga wajar adalah penggunaan metode TNMM. Kalau metode TNMM bisa, maka komponen biaya dan penghasilan yang ada harus sudah wajar. Komponen biaya dan penghasilan saja masih ditentukan kewajarannya, lalu bagaimana bisa menggunakan metode TNMM.

Keterangan : Peneliti (P), Informan (I)

CURRICULUM VITAE



I. Data Pribadi

Nama : Khustanul Arif
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 13 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat asal : Ds. Dampaan RT.02 RW.02 Kec. Cerme Kab Gresik
Alamat di Malang : Jl. Simpang Pisang Kipas No. 54 Malang
Email : Khustanularif@gmail.com

II. Pendidikan Formal

1. MI As- Shibyan Dampaan Tahun 1999 - 2005
2. SMP YPI Darussalam 1 Cerme Tahun 2005 - 2008
3. SMK Negeri 1 Cerme Tahun 2008 - 2011
4. FIA Prodi Perpajakan, Universitas Brawijaya Tahun 2012 – Sekarang

III. Pengalaman Organisasi

1. Staff Muda Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Periode 2012 – 2013
2. Staff Internal Affair UKM FORMASI Universitas Brawijaya Periode 2013
3. Coordinator Human resource Development FORMASI UB Periode 2014

IV. Prestasi Non Akademis

1. Juara 2 FORCE Debat Competition Universitas Brawijaya Tahun 2012
2. Juara 2 Olimpiade Pajak FIA Universitas Brawijaya Tahun 2014
3. Finalis LKTI Pengadaan Barang dan Jasa LKPP Tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.